

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (2005) dalam Saraswati dan Parasetya (2022), “teori agensi menggambarkan adanya hubungan kontrak antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Dalam teori agensi, terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih *principal* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal*”. Menurut Donleavy (2018), “teori agensi menyatakan bahwa perusahaan dimiliki oleh pemegang saham namun dijalankan oleh para manajer dan kepentingan ekonomi dari dua pihak tersebut berbeda. Teori agensi mendeskripsikan manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal* dalam sebuah perusahaan”.

Anita (2017) menyatakan bahwa “manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh sebab itu, manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham”. “Pemegang saham (*principal*) sebagai pemilik perusahaan ingin melihat bagaimana kekayaannya dikelola dan diperbesar, di mana para pemegang saham mengharapkan keuntungan berlanjut dan bertumbuh, tingkat dividen dan harga saham secara stabil meningkat sebagai hasil dari perolehan keuntungan yang lebih tinggi tetapi juga dari semakin meningkatnya optimisme terkait masa depan perusahaan” (Donleavy, 2018). Lestari dan Prayogi (2017) menyatakan “manajer (*agent*) sebagai orang-orang yang mengelola perusahaan mempunyai kepentingan tersendiri dalam memaksimalkan imbalan dari *principal* yaitu berupa gaji, bonus, insentif, dan lain-lain”.

“*Agent* ditunjuk oleh *principal* untuk menjalankan transaksi bisnis dan diharapkan dapat mendukung kepentingan *principal*. Namun, seiring dengan

berjalannya aktivitas bisnis, timbul ketidakpercayaan antara kedua pihak sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam perusahaan” (Halim, 2021). Himam dan Masitoh (2020) menyatakan “dalam hubungan keagenan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), pemilik ingin manajer bertindak bagi kepentingan pemilik tetapi terkadang manajer bertindak untuk kepentingan sendiri”. “*Agent* yang menyusun laporan keuangan cenderung lebih mementingkan kepentingan perusahaan” (Syahputra dan Yahya, 2017). “Dikarenakan manajer (*agent*) diangkat oleh pemegang saham (*principal*) dan bertindak atas delegasi wewenang dari *principal* maka idealnya akan bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham, tetapi dalam praktik sering terjadi konflik antara pemegang saham dan manajer. Hal ini diakibatkan karena pada realitanya seringkali manajer memiliki tujuan lain yang tidak sama atau bahkan bertentangan dengan tujuan utama tersebut” (Siallagan, 2020).

“Masalah di antara para pihak yang timbul dari kepentingan yang saling bertentangan dapat menyebabkan menurunnya kualitas dari laporan keuangan” (Syahputra dan Yahya, 2017). Siallagan (2020) menyatakan “pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat menimbulkan permasalahan dalam *agency theory* yang dikenal sebagai *Asymmetric Information (AI)*, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*”. “Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah ke *asymmetric information* karena *agent* berada pada posisi dengan informasi lebih banyak dibandingkan dengan *principal*. Manajer dapat membuat keputusan yang menguntungkan kepentingannya, namun berpotensi merugikan kepentingan *principal* dan *stakeholders* lainnya” (Fauziah, 2017).

Menurut Schroeder *et al.* (2019), “terdapat 2 jenis *asymmetric information*, yaitu:”

1) “*Adverse Selection*”

“*Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau lebih pihak untuk transaksi bisnis atau transaksi potensial mempunyai keuntungan informasi lebih dari pihak lain. *Adverse selection* terjadi pada

saat beberapa orang, seperti manajer maupun pihak dalam lain lebih mengetahui kondisi terkini serta prospek perusahaan ke depan daripada investor. Manajer (*agent*) memiliki informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan tetapi pemegang saham (*principal*) tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, *principal* tidak dapat mengetahui apakah *agent* telah membuat keputusan yang paling tepat berdasarkan informasi yang dimiliki atau tidak akibat *principal* yang tidak memiliki informasi tersebut”.

2) “*Moral Hazard*”

“*Moral hazard* adalah jenis asimetri informasi di mana satu atau lebih pihak pada transaksi bisnis atau transaksi potensial dapat mengamati tindakan manajer dalam penyelesaian transaksi-transaksi sedangkan pihak lainnya tidak bisa. Terjadi karena pemisahan kepemilikan dan kontrol yang menjadi karakteristik dari sebagian besar perusahaan besar. Manajer (*agent*) melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi yang tidak dapat diamati (tersembunyi) sehingga dapat merugikan kepentingan dari pemegang saham (*principal*)”

Siallagan (2020) menyatakan “permasalahan keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer dapat menimbulkan biaya ekuitas (*equity agency cost*). Menurut Siallagan (2020), “terdapat 3 jenis biaya keagenan, yaitu:”

- 1) “Biaya *monitoring* ditanggung *principal* untuk membatasi aktivitas *agent* yang berbeda kepentingan dengan *principal*. Contoh dari biaya *monitoring* antara lain biaya audit, biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajemen, pembatasan anggaran, dan aturan-aturan operasi”.
- 2) “Biaya *bonding* dikeluarkan oleh *agent* untuk memberikan kepastian kepada *principal* bahwa *agent* tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan investor. Pemegang saham hanya mengizinkan *bonding cost* terjadi jika biaya tersebut dapat mengurangi *monitoring cost*. Contoh dari

biaya *bonding* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menyediakan laporan keuangan kepada *principal*”.

- 3) “*Residual loss* merupakan kemakmuran dalam nilai mata uang yang turun sebagai akibat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Hal ini terjadi karena perbedaan keputusan antara *agent* dan keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kemakmuran *principal*”.

“Dalam kaitannya antara teori agensi dengan opini audit *going concern*, *agent* bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. *Agent* sebagai pihak yang menghasilkan laporan keuangan, mempunyai kesempatan untuk memanipulasi data terkait kondisi perusahaan” (Saputra dan Kustina, 2018). “Manajemen diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan lebih mengetahui segala informasi tentang kondisi perusahaan dibandingkan pemegang saham. Oleh sebab itu, untuk mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen diperlukan suatu audit atas laporan keuangan oleh auditor eksternal agar laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen menjadi lebih andal” (Kurnia dan Mella, 2018). Syahputra dan Yahya (2017) menyebutkan “peran auditor independen sangat dibutuhkan untuk mensimetriskan informasi antara kedua pihak”.

“Auditor sebagai pihak yang dianggap mampu menjembatani kepentingan *principal* dan *agent*, melakukan *monitoring* terhadap kinerja manajemen apakah telah sesuai dengan laporan keuangan atau tidak” (Saputra dan Kustina, 2018). Menurut Himam dan Masitoh (2020), “sebagai pihak independen, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil oleh manajemen telah sesuai dengan keinginan *principal*”.

“Auditor independen akan mengecek kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen. Setelah audit atas suatu laporan keuangan dilakukan, auditor akan memberikan opini sesuai dengan keadaan perusahaan yang diaudit” (Himam dan Masitoh, 2020). Saputra dan Kustina (2018) menyatakan “auditor memberikan jasa untuk menilai kewajaran laporan

keuangan perusahaan yang dibuat oleh *agent* dengan hasil akhir berupa opini audit. Opini auditor harus berkualitas yang ditunjukkan dengan semakin objektif dan transparannya informasi keuangan perusahaan yang diungkap”. “Selain penilaian wajar atau tidaknya laporan keuangan, auditor berkewajiban untuk menilai jalannya kelangsungan usaha perusahaan” (Halim, 2021). Menurut Sari (2012) dalam Himam dan Masitoh (2020), “jika dalam proses pengidentifikasian informasi tentang kondisi perusahaan auditor tidak menemukan keraguan besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, maka opini audit *non-going concern* akan diberikan, sedangkan opini audit *going concern* akan diberikan jika terdapat keraguan besar terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya”.

2.1.2 Teori Sinyal

Berdasarkan Spence (1973) dalam Ghozali (2020), “teori sinyal menjelaskan pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan pihak internal perusahaan dapat memengaruhi perilaku pihak eksternal perusahaan sebagai penerima sinyal”. Menurut Godfrey *et al.* (2010) dalam Hasanah dan Lekok (2019), “teori sinyal menjelaskan bahwa manajer akan memberikan sinyal kepada investor melalui laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa perusahaan mempunyai ekspektasi memberikan keuntungan di masa mendatang”. “Teori sinyal merupakan tindakan bagi para investor yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dengan tujuan memberi petunjuk atau sinyal mengenai kondisi, kinerja, dan prospek perusahaan di masa depan” (Brigham dan Houston, 2014 dalam Victoria dan Viriany, 2019).

“Teori sinyal menjelaskan perilaku dua pihak ketika mengakses informasi yang berbeda. Selain itu, teori sinyal juga menjelaskan tindakan yang diambil oleh pengambil sinyal (*signaler*) dalam memengaruhi perilaku penerima sinyal. Sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Sinyal dapat berwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari yang secara langsung dapat diamati maupun

yang perlu dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Terlepas dari berbagai wujud dari sinyal tersebut dikeluarkan, semuanya menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Sehingga, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan” (Ghozali, 2020).

Menurut Ross (1977) dalam Irene dan Suhendah (2020), “konsep teori sinyal dan asimetri informasi sangat berkaitan erat, teori asimetri informasi terjadi ketika pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan”. Menurut Rusfika dan Wahidahwati (2017), “salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar. “Sinyal atau isyarat tersebut dijadikan sebagai petunjuk bagi investor sebelum melakukan investasi sesuai dengan keadaan perusahaan. Sinyal tersebut dapat berupa informasi atau laporan mengenai kinerja atau kegiatan manajemen yang telah dilakukan guna merealisasikan keinginan pemegang saham. Kondisi perusahaan baik saat mengalami keuntungan atau kerugian dapat menjadi sinyal positif dan negatif. Jika perusahaan memperoleh keuntungan maka akan memberikan sinyal positif bagi investor, sebaliknya jika menderita kerugian maka akan menjadi sinyal negatif bagi investor (Ratih dan Damayanthi, 2016 dalam Nugraheni dan Mertha, 2019).

“Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan dalam memberikan sinyal tersebut timbul karena asimetri informasi antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar (investor), dimana investor mengetahui internal perusahaan yang relatif sedikit dibandingkan manajemen. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan kurangnya kepercayaan investor terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian, salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh emiten. Perusahaan yang yakin bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa depan akan cenderung

mengkomunikasikan informasi tersebut pada investor” (Melewar, 2008 dalam Berliani *et al.*, 2021)

“Hubungan antara teori sinyal dengan opini audit *going concern* adalah perusahaan akan memberikan kabar baik kepada publik agar publik tertarik dengan perusahaan tersebut. Teori sinyal mengatakan bahwa perusahaan akan berusaha memberikan kabar baik tentang keadaan perusahaan kepada publik dalam rangka meningkatkan jumlah investor, sehingga peran auditor sangat diperlukan untuk mengetahui keaslian dari sinyal tersebut” (Renata dan Meiden, 2021). “Agar pihak berkepentingan seperti investor dan pemegang saham meyakini keandalan informasi suatu entitas tersebut, informasi berupa laporan keuangan harus diaudit oleh auditor yang kompeten dan independen. Dimana selain menyajikan informasi atas laporan keuangan yang andal dalam laporan auditor, auditor juga memberikan pendapatnya atas keberlangsungan usaha perusahaan (*going concern*) sebagai sinyal positif kepada para investor dan pemegang saham” (Apriyani *et al.*, 2018)

2.1.3 Laporan Keuangan

Kieso *et al.* (2018) mendefinisikan laporan keuangan sebagai “alat utama yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan kinerja perusahaan pada masa lalu yang diukur dalam bentuk uang”. Berdasarkan IAI (2021) dalam PSAK 1, “laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. “Dalam rangka mencapai tujuan, laporan keuangan menyajikan informasi terkait entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai

pemilik, dan arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan entitas, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya arus kas masa depan” (IAI, 2021 dalam PSAK 1).

Menurut IAI (2019) dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), “aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dapat mengalir ke entitas. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “penghasilan merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau pengurangan nilai aset atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan nilai ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada pemegang saham”. “Keuntungan merupakan peningkatan ekuitas (aset bersih) dari transaksi tambahan atau insidental entitas dari semua kejadian dan kondisi lain yang memengaruhi entitas selama periode kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Kerugian adalah penurunan ekuitas (aset bersih) dari transaksi tambahan atau insidental entitas dan dari semua transaksi lain dari peristiwa dan kondisi lain yang memengaruhi entitas selama suatu periode mengharap yang dihasilkan dari pengeluaran atau distribusi kepada pemilik” (Kieso *et al.*, 2018). Menurut IAI (2021) dalam PSAK 2, “arus kas adalah arus masuk, arus keluar kas, dan setara kas”.

Menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, “laporan keuangan lengkap terdiri dari:”

1) “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”

“Laporan yang menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas sebuah perusahaan secara spesifik pada tanggal tertentu” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Laporan posisi keuangan memberikan dasar dalam menghitung tingkat pengembalian dan mengevaluasi struktur modal, menilai risiko dan arus kas masa depan dari perusahaan” (Kieso *et al.*, 2018). “Laporan posisi keuangan disajikan dengan mengelompokkan aset dan liabilitas yang serupa untuk meningkatkan pemahaman pengguna laporan posisi keuangan. Aset terdiri dari *intangible assets, property, plant, and equipment, long term investments*, dan *current assets*. Liabilitas terbagi menjadi *non-current liabilities* dan *current liabilities* serta ekuitas yang dikelompokkan bervariasi sesuai dengan bentuk organisasi entitas” (Weygandt *et al.*, 2019).

2) “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”

“Laporan yang menggambarkan kesuksesan atau profitabilitas dari operasi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi berisi informasi pendapatan dan beban suatu periode sehingga menghasilkan laba bersih atau rugi bersih (Weygandt *et al.*, 2019). “Laporan laba rugi bermanfaat bagi pengguna laporan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dari perusahaan, menyediakan basis dalam memprediksi kinerja masa depan, dan membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan” (Kieso *et al.*, 2018). “Penghasilan komprehensif lain berisi keuntungan dan kerugian yang dikeluarkan sebagai komponen perhitungan laba rugi” (Weygandt *et al.*, 2019).

3) “Laporan perubahan ekuitas selama periode”

“Laporan perubahan ekuitas berisi informasi sebagai berikut: (a) total penghasilan komprehensif selama periode berjalan, yang menunjukkan secara tersendiri jumlah total yang dapat diatribusikan kepada pemilik

entitas induk dan kepada kepentingan *non*-pengendali; (b) untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif; (c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode”.

4) “Laporan arus kas selama periode”

“Laporan yang menyajikan informasi tentang kas masuk (penerimaan) dan kas keluar (pengeluaran) pada suatu periode akuntansi yang spesifik. Pada laporan arus kas, penerimaan kas dan pengeluaran kas dibedakan menjadi tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan” (Weygandt *et al.*, 2019). Menurut IAI (2021) dalam PSAK 2, “aktivitas operasi yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan seperti penerimaan dari penjualan dan pembayaran dalam bentuk kas. Aktivitas investasi merupakan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas seperti pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap dan penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas seperti penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrumen ekuitas lain”.

5) “Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain”

“Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Bagian ini memberikan deskripsi naratif atau pemisahan pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

6) “Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya”

“Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode terdekat sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan terkait. Disajikan sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang disyaratkan SAK dan disiapkan sesuai dengan SAK”.

7) “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya”.

“Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum apabila: (a) entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan; (b) penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif, atau reklasifikasi yang memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. Entitas menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode terdekat sebelumnya, dan awal periode terdekat sebelumnya”.

Menurut IAI (2019) dalam KKPK, “terdapat dua karakteristik kualitatif fundamental sehingga informasi keuangan menjadi berguna sebagai berikut:”

1) “Relevansi”

“Informasi keuangan yang relevan mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi mungkin mampu membuat perbedaan dalam keputusan bahkan jika sebagian pengguna memilih untuk tidak mengambil keuntungan atas informasi tersebut dari

sumber lainnya. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai *input* yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil (*outcome*) masa depan. Informasi keuangan disebut memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik (mengkonfirmasi/mengubah) tentang evaluasi sebelumnya”.

2) “Representasi tepat”

Laporan keuangan mempresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Selain dapat menjadi informasi yang berguna dan mempresentasikan fenomena yang relevan, informasi keuangan juga harus mempresentasikan secara tepat fenomena yang harus direpresentasikan. Agar dapat menunjukkan representasi tepat, maka harus memiliki karakteristik lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Penjabaran lengkap mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna agar dapat memahami fenomena yang digambarkan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Penjabaran netral yaitu penjabaran tanpa bias dalam pemilihan atau penyajian informasi keuangan. Penjabaran netral yaitu tidak diarahkan, dibobotkan, ditekankan, ditekankan kembali, atau dengan kata lain dimanipulasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima lebih baik atau tidak baik oleh pengguna. Bebas dari kesalahan berarti tidak terdapat kesalahan/kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena, dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang dilaporkan telah dipilih dan diterapkan tanpa ada kesalahan dalam prosesnya”.

Menurut IAI (2019) dalam KKPK, “karakteristik kualitatif peningkatan yang meningkatkan kegunaan informasi keuangan sebagai berikut:”

a) “Keterbandingan”

“Keterbandingan memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam, dan perbedaan antara, pos-pos. Berbeda dari

karakteristik kualitatif lainnya, keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan mensyaratkan paling tidak dua pos”.

b) “Keterverifikasian”

“Keterverifikasian membantu meyakinkan bahwa informasi mempresentasikan fenomena ekonomik secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian artinya berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat”.

c) “Ketepatanwaktuan”

“Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut”.

d) “Keterpahaman”

“Keterpahaman berarti pengklasifikasian, pengkarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas dalam membuat informasi tersebut terpahami”.

Menurut Rahmawati *et al.* (2018), “laporan keuangan merupakan sarana penting untuk mengkomunikasikan informasi keuangan pada *stakeholders*”. Berdasarkan Weygandt *et al.* (2019), “terdapat dua pengguna informasi keuangan, yaitu:”

1) “*Internal users*”

Pengguna internal dari informasi akuntansi yaitu manajer yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis termasuk manajer pemasaran, *supervisor* produksi, direktur keuangan, dan karyawan perusahaan”.

2) “*External users*”

Pengguna eksternal dari informasi akuntansi berupa individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan terkait perusahaan. Dua jenis pengguna eksternal pada umumnya adalah

investor dan kreditor. Investor menggunakan informasi akuntansi dalam membuat keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual saham suatu perusahaan. Kreditor seperti pemasok atau bank menggunakan informasi akuntansi dalam mengevaluasi risiko pemberian kredit atau pemberian pinjaman uang”.

2.1.4 Audit

Arens *et al.* (2017) mengungkapkan “*auditing* merupakan proses pengumpulan serta pengevaluasian bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang pribadi yang kompeten dan independen”. “Audit didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif terkait asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan” (Halim, 2008 dalam Rosini dan Hati, 2017). Menurut Agoes (2017), “audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan”.

“Audit berbeda dari akuntansi karena auditor berfokus menentukan apakah informasi yang terekam/tercatat mencerminkan dengan tepat peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi tetapi auditor perlu memahami standar akuntansi agar dapat melakukan proses *auditing*. Arens *et al.* (2017) menyebutkan “perbedaan *accounting* dan *auditing* ialah pada audit terdapat bukti audit, penentuan prosedur audit yang tepat, penentuan jumlah dan tipe dari *item* yang akan diuji, serta pengevaluasian dari hasil uji audit”. “Audit mempunyai sifat analitis di mana pemeriksaan dimulai dari angka-angka dalam laporan keuangan kemudian dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar dan

buku pembantu, buku jurnal, dan bukti-bukti transaksi pembukuan. Berbeda dengan akuntansi yang bersifat konstruktif yang dimulai dengan pencatatan bukti transaksi, buku jurnal, buku besar, buku pembantu, serta neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan” (Indrayati, 2017).

Berdasarkan Noval (2019), “terdapat 3 jenis auditor yang dikenal dalam dunia perauditan, yaitu:”

1) “Auditor internal (*internal auditor*)”

“Auditor yang merupakan pegawai dari suatu entitas (pegawai suatu perusahaan atau organisasi) atau dipekerjakan oleh sebuah entitas”.

2) “Auditor independen (*independent auditor*)”

“Auditor yang bekerja di kantor-kantor akuntan publik. Sesuai dengan namanya, auditor independen harus bersikap independen, tidak boleh dipengaruhi oleh pihak-pihak dari klien”.

3) “Auditor pemerintah”

“Auditor yang bekerja untuk pemerintah, melaksanakan tugas-tugas audit dalam rangka membantu lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi pemerintah dalam kegiatan operasi dan kegiatan lain yang diperlukan”.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 68 terkait Perseroan Terbatas, “direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:”

- a) “Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat”.
- b) “Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat”.
- c) “Perseroan merupakan perseroan terbuka”.
- d) “Perseroan merupakan persero”.
- e) “Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)”.
- f) “Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menurut Agoes (2017), “jika ditinjau dari luas pemeriksaan auditor, audit dapat terbagi menjadi:”

1) “Pemeriksaan umum (*general audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan”.

2) “Pemeriksaan khusus (*specialized audit*)

Pemeriksaan yang sifatnya terbatas (sesuai permintaan *auditee*) yang dilakukan oleh auditor independen, dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan”.

Berdasarkan Arens *et al.* (2017), “terdapat 3 tipe audit yang dapat dilaksanakan oleh auditor dalam jasa audit yang diberikan, yaitu:”

1) “Audit operasional (*operational audit*)”

“Audit operasional merupakan jenis audit yang menilai efisiensi dan efektivitas dari prosedur serta metode yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dilakukan *review* tidak terbatas pada akuntansi tetapi mencakup evaluasi terhadap struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain sesuai dengan kualifikasi dari auditor sendiri. Audit operasional menghasilkan laporan audit operasional berupa rekomendasi auditor (*management letter*). Contoh dari audit operasional yaitu menilai apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi bagi anak perusahaan telah beroperasi secara efisien dan efektif”.

2) “Audit kepatuhan (*compliance audit*)”

“Audit kepatuhan merupakan proses audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah *auditee* telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang telah diatur oleh pihak dengan otoritas yang lebih tinggi. Audit kepatuhan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berisi hasil pemeriksaan dan saran. Hasil audit kepatuhan dilaporkan kepada manajemen dan bukan untuk konsumsi luar. Hal ini dikarenakan manajemen

merupakan kelompok utama yang peduli dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ditentukan. Contohnya yaitu penentuan apakah persyaratan bank untuk perpanjangan pinjaman telah dipenuhi”.

3) “Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)”

“Audit laporan keuangan merupakan proses audit yang dilakukan untuk menentukan apakah informasi yang tertera dalam laporan keuangan telah sesuai kriteria atau peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disampaikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan, auditor perlu mengumpulkan bukti untuk dapat menentukan apakah laporan keuangan tersebut memiliki kesalahan yang bersifat material atau terdapat salah saji lainnya. Audit laporan keuangan menghasilkan opini audit sebagai hasil akhir dari proses audit”.

Standar Audit (SA) 200 menyatakan “tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Sebagai basis untuk opini auditor, SA mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan” (IAPI, 2021). Menurut Arens *et al.* (2017), “tujuan audit berdasarkan asersi yang ingin diuji oleh auditor dikelompokkan sebagai berikut:”

1) “Terkait transaksi dan peristiwa”

- a) “*Occurrence* merupakan asersi yang menyatakan apakah transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama proses akuntansi”.
- b) “*Completeness* merupakan asersi yang menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan ke jurnal telah disertakan seluruhnya”.
- c) “*Classification* merupakan asersi yang menyatakan apakah transaksi yang terjadi telah tercatat pada akun yang tepat”.

- d) “*Accuracy* merupakan asersi yang menyatakan apakah transaksi telah dicatat dalam jumlah yang benar atau tepat”.
- e) “*Cutoff* merupakan asersi yang memastikan apakah transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat”.
- 2) “Terkait saldo”
- a) “*Existence* merupakan asersi yang digunakan untuk memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan yang tercatat pada neraca berada pada tanggal neraca tersebut”.
- b) “*Completeness* merupakan asersi yang digunakan untuk memastikan apakah semua jumlah dalam akun harus disajikan dalam laporan keuangan telah disertakan seluruhnya”.
- c) “*Valuation and allocation* merupakan asersi yang memastikan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang telah dimasukkan pada laporan keuangan dengan jumlah yang tepat termasuk penyesuaian nilai yang mencerminkan jumlah aset pada nilai wajar atau nilai realisasi bersih”.
- d) “*Right and obligation* merupakan asersi yang memastikan apakah aset dan liabilitas yang tercatat merupakan hak dan kewajiban entitas pada tanggal tersebut”.
- 3) “Terkait pengungkapan”
- a) “*Occurrence dan right and obligation* merupakan asersi yang memastikan apakah peristiwa yang diungkap telah terjadi dan menjadi hak serta kewajiban entitas”.
- b) “*Completeness* merupakan asersi yang memastikan apakah seluruh pengungkapan terkait telah dimasukkan dalam laporan keuangan”.
- c) “*Accuracy and valuation* merupakan asersi yang memastikan apakah semua pengungkapan terkait telah diungkapkan secara benar dan dalam jumlah yang tepat”.
- d) “*Classification and understandability* merupakan asersi yang memastikan apakah pengungkapan terkait pengklasifikasian dalam laporan keuangan dapat dipahami”.

Arens *et al.* (2017) menyatakan “proses audit terdiri dari empat tahapan, yaitu:”

1) “Merencanakan dan mendesain pendekatan audit”

“Melakukan perencanaan awal seperti mendapat pemahaman tentang bisnis serta lingkungan bisnis klien, mengestimasi risiko bisnis klien dengan sebuah proses yang disebut *assessing control risk* untuk melihat keefektifan dari pengendalian internal perusahaan, pelaksanaan prosedur analitis awal, penetapan materialitas yang akan berpengaruh terhadap rencana audit yang akan disusun, risiko audit dan risiko inheren, serta pemahaman pengendalian internal, dan pengumpulan informasi”.

2) “Melaksanakan uji pengendalian dan keterjadian transaksi”

“Dilakukan untuk meminimalisir risiko pengendalian (*control risk*). Auditor akan mengevaluasi pencatatan transaksi klien dengan memverifikasi sejumlah transaksi perusahaan dengan sebuah proses yang disebut *substantive tests of transactions*. Agar semakin efisien, biasanya auditor akan melaksanakan *test of controls* dan *substantive test of transactions* secara bersamaan”.

3) “Melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo”

“Dilakukan dua aktivitas utama yaitu melaksanakan *substantive analytical procedures* dan *test of details of balances*. *Substantive analytical procedures* digunakan untuk memberikan kepastian tentang sebuah saldo akun. *Test of details of balances* dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait keterjadian transaksi dan mengetahui apabila terdapat salah saji material dalam saldo laporan keuangan”.

4) “Menyelesaikan audit serta menerbitkan laporan audit”

“Setelah auditor melaksanakan seluruh tujuan audit atas tiap akun dalam laporan keuangan dan pengungkapan terkait, semua informasi dikumpulkan akan dikombinasikan sehingga terbentuk kesimpulan secara keseluruhan yang menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disampaikan secara wajar atau tidak”.

Menurut Arens *et al.* (2017) “terdapat lima jenis pengujian audit untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disampaikan secara wajar, yaitu:”

1) “*Risk assessment procedures*”

“Prosedur yang dilakukan auditor untuk memperoleh pemahaman atas suatu perusahaan dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal perusahaan untuk menilai risiko salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan. Termasuk tipe pengujian yang terjangkau setelah *substantive analytical procedures* karena pemahaman pengendalian internal dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, mengobservasi, serta melaksanakan prosedur analitis yang telah direncanakan”.

2) “*Test of controls*”

“Prosedur yang dilakukan untuk menguji risiko pengendalian atas setiap transaksi yang terkait dengan tujuan audit. Digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian dalam rangka mengurangi risiko pengendalian yang ditetapkan. Terdapat 4 jenis prosedur *test of controls*, yaitu melakukan tanya jawab dengan personil klien, dilakukan telaah atas dokumen, catatan dan laporan, mengamati aktivitas terkait dengan pengendalian entitas, dan pelaksanaan ulang atas prosedur pengendalian internal klien. Akibat perlu melakukan tanya jawab, observasi serta inspeksi sehingga menjadi lebih mahal dari pada *risk assessment procedures*. Dibutuhkan sebuah bukti bahwa pengendalian secara efektif telah dilakukan terlebih apabila terdapatnya *reperformance*”.

3) “*Substantive test of transactions*”

“Prosedur audit yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat salah saji moneter dari tujuan audit terkait transaksi telah dipenuhi untuk setiap kelas transaksi. Pengujian ini lebih memakan biaya daripada *test of controls* karena dibutuhkan perhitungan ulang (*recalculations*) dan *tracing* (penelusuran). Dalam lingkungan terkomputerisasi, pengujian digunakan untuk transaksi dengan jumlah sampel yang besar”.

4) “*Substantive analytical procedures*”

“Pengujian dilakukan untuk menemukan kemungkinan salah saji material di laporan keuangan, serta untuk menyediakan bukti substantif. Pengujian audit paling ekonomis karena hanya berkaitan dengan penghitungan dan perbandingan. Tipe pengujian ini membandingkan jumlah yang tercatat dengan jumlah yang diekspektasikan oleh auditor. Pengujian ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk penyediaan bukti terhadap suatu saldo akun”.

5) “*Test of details of balances*”

“Prosedur yang dilakukan dalam menguji apakah terdapat salah saji moneter yang menentukan bahwa tujuan audit terkait saldo telah dilaksanakan untuk setiap saldo yang signifikan. Tipe pengujian yang mengeluarkan lebih banyak biaya daripada jenis pengujian lain karena diperlukannya pengiriman konfirmasi serta perhitungan persediaan”.

Berdasarkan SA 500, “bukti audit merupakan informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup informasi baik yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya” (IAPI, 2021). Menurut Arens *et al.* (2017), “bukti audit diklasifikasikan sebagai berikut:”

1) “Pemeriksaan fisik”

“Pemeriksaan fisik merupakan inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aset berwujud. Pemeriksaan fisik merupakan bukti audit yang sering kali berkaitan dengan persediaan dan kas, verifikasi sekuritas, wesel tagih, dan aset berwujud. Dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi apakah suatu aset benar-benar ada (tujuan *existence*), dan pada tingkat tertentu apakah aset yang ada tersebut telah dicatat (tujuan *completeness*)”.

2) “Konfirmasi”

“Konfirmasi menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor. Permintaan ini ditujukan bagi klien, dan klien akan meminta pihak ketiga untuk memberikan tanggapannya secara langsung

pada auditor. Akibat berasal dari pihak ketiga, bukti audit ini sangat dipercaya dan sering digunakan. Terdapat 2 jenis konfirmasi yaitu konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif adalah jenis konfirmasi di mana responden diminta untuk memberi respon dan menunjukkan apakah responden setuju dengan informasi tersebut. Berbeda dengan konfirmasi negatif yang merupakan konfirmasi di mana responden diminta merespon hanya ketika informasi tersebut tidak benar dan tidak terdapat pengujian tambahan apabila respon tidak diterima”.

3) “Inspeksi”

“Inspeksi merupakan pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang atau harus, termasuk dalam laporan keuangan. Dokumen terbagi menjadi dua yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien. Contohnya faktur penjualan, laporan jam kerja karyawan, dan laporan penerimaan persediaan. Dokumen eksternal adalah dokumen yang ditangani oleh seseorang di luar organisasi klien yang merupakan pihak yang melakukan transaksi seperti faktur dari pemasok, sertifikat tanah, dan perjanjian utang”.

4) “Prosedur analitis”

“Prosedur analitis merupakan evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Tujuan prosedur analitis adalah untuk memahami industri dan bisnis klien, menilai kemampuan keberlanjutan usaha entitas, menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan memberikan bukti yang mendukung saldo akun. Contohnya seperti auditor membandingkan persentase margin kotor tahun berjalan dengan tahun sebelumnya”.

5) “Permintaan keterangan/wawancara dengan klien”

“Memperoleh informasi secara tertulis maupun lisan dari klien untuk menanggapi pertanyaan dari auditor”.

6) “Penghitungan ulang”

“Perhitungan ulang melibatkan pengecekan kembali sampel perhitungan yang dilakukan oleh klien. Contohnya dilakukan pemeriksaan terhadap perkalian faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan jurnal, pengecekan terhadap kalkulasi beban penyusutan dan beban dibayar di muka”.

7) “Pelaksanaan kembali”

“Pelaksanaan kembali merupakan pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang pada awalnya dilakukan sebagai bagian dari sistem akuntansi dan pengendalian internal entitas. Contohnya adalah ketika auditor membandingkan harga yang tertera dalam faktur dengan harga yang resmi, atau melaksanakan kembali penentuan umur piutang usaha”.

8) “Observasi”

“Observasi yaitu melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Observasi memberikan bukti audit tentang pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun hanya terbatas pada titik waktu tertentu pada saat observasi tersebut dilaksanakan. Contohnya adalah auditor melakukan perhitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas”.

Berdasarkan Arens *et al.* (2017), “terdapat enam karakteristik reliabilitas dari bukti audit, yaitu:”

1) “Independensi penyedia bukti”

“Bukti yang diperoleh dari luar entitas lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti yang diperoleh dalam entitas. Seperti komunikasi dari bank, pengacara, atau para pelanggan, dokumen yang berasal dari luar organisasi seperti polis asuransi akan lebih dipercaya dibandingkan komunikasi atau hasil wawancara yang berasal dari klien dan dokumen yang berasal dari intern perusahaan bahkan yang tidak pernah dikirim ke luar organisasi seperti permintaan pembelian”.

2) “Efektivitas pengendalian intern klien”

“Jika pengendalian internal klien efektif maka bukti audit lebih dapat diandalkan daripada pengendalian internal tidak berjalan secara efektif”.

3) “Pengetahuan langsung auditor”

“Bukti yang diperoleh langsung dari auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, penghitungan ulang, dan inspeksi lebih dapat diandalkan daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung”.

4) “Kualifikasi individu yang menyediakan informasi”

“Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti audit tidak bisa diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut telah memenuhi kualifikasi. Bukti yang diperoleh langsung dari auditor tidak dapat diandalkan jika auditor tidak dapat memenuhi kualifikasi untuk mengevaluasi bukti tersebut”.

5) “Tingkat objektivitas”

“Bukti objektif lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang membutuhkan pertimbangan yang matang (bukti subjektif). Contohnya meliputi konfirmasi piutang usaha dan saldo bank, dan perhitungan fisik sekuritas dan kas. Bukti-bukti subjektif meliputi surat yang ditulis oleh pengacara klien yang membahas hasil yang mungkin akan diperoleh dari gugatan hukum yang sedang dihadapi oleh klien, tanya jawab dengan manajer, observasi atas persediaan yang usang selama pemeriksaan fisik”.

6) “Ketepatan waktu”

“Bukti yang terkumpul tepat waktu lebih dapat diandalkan untuk akun neraca apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Untuk akun-akun laba rugi, bukti yang diperoleh lebih dapat diandalkan apabila sampel dari keseluruhan periode selama tahun yang diaudit seperti sampel transaksi acak penjualan untuk setahun penuh bukan hanya dari sebagian periode”.

Arens *et al.* (2017) menyatakan “auditor memberi toleransi untuk beberapa tingkat risiko atau ketidakpastian dalam menjalankan fungsi audit. Seorang auditor yang efektif mengidentifikasi risiko yang muncul dan

menangani risiko dengan cara yang tepat. Sebagian besar risiko yang dihadapi auditor sulit untuk diukur dan membutuhkan pertimbangan auditor sebelum respons tersebut diberikan”. “Risiko audit merupakan risiko yang terjadi, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya” (Noval, 2019). Menurut Noval (2019), “terdapat 4 komponen dalam risiko audit:”

1) “Risiko deteksi yang direncanakan (*planned detection risk*)”

“Risiko bahwa bukti audit untuk suatu segmen gagal mendeteksi salah saji yang melebihi salah saji yang dapat ditoleransi”.

2) “Risiko bawaan (*inherent risk*)”

“Mengukur penilaian auditor atas kemungkinan salah saji (kekeliruan atau kecurangan) material dalam segmen, sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Jika auditor menyimpulkan terdapat salah saji setelah memperhitungkan pengendalian internal, auditor dapat menyimpulkan bahwa risiko inheren perusahaan tinggi”.

3) “Risiko pengendalian (*control risk*)”

“Mengukur penilaian auditor mengenai apakah salah saji yang melebihi jurnal yang dapat ditoleransi dalam suatu segmen dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Auditor dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal sama sekali tidak efektif untuk mencegah atau mendeteksi salah saji”.

4) “Risiko audit yang dapat diterima (*acceptable audit risk*)”

“Mengukur kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji material setelah audit selesai, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan”.

“Risiko bawaan dan risiko pengendalian menjadi risiko yang lebih dulu ada, terlepas dilakukan atau tidak dilakukannya audit atas laporan keuangan. Risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah sesuai keputusan auditor. Risiko deteksi memiliki hubungan terbalik dengan risiko

bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima” (Noval, 2019).

SA 240 menyatakan, “auditor yang melaksanakan audit bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Dampak potensial akibat keterbatasan bawaan adalah signifikan khususnya dalam kasus penyajian yang disebabkan oleh kecurangan. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material diakibatkan kecurangan lebih tinggi dari risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kesalahan” (IAPI, 2021).

2.1.5 Opini Audit *Going Concern*

Astari dan Latrini (2017) menyatakan bahwa “setelah auditor independen melakukan tugas pengauditan atas laporan keuangan perusahaan, maka auditor independen dapat memberikan pendapat atau opini audit yang sesuai dengan keadaan keuangan perusahaan yang diauditnya”. “Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pada hasil audit” (Ariani, 2019). “Opini yang diberikan oleh auditor merupakan salah satu pertimbangan para *shareholders* dalam pengambilan keputusan investasi” (Astari dan Latrini, 2017). Berdasarkan SA 700, “tujuan auditor adalah untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh, dan menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini audit tersebut” (IAPI, 2021).

“Opini audit dinyatakan dalam paragraf pendapat dalam laporan audit. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan kaki serta penjelasan, dan tambahan informasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyajian laporan keuangan” (Anita, 2017).

Berdasarkan SA 700, “auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Terdapat 2 macam opini yang dapat diberikan auditor yaitu opini tanpa modifikasian dan opini dengan modifikasian. Opini tanpa modifikasian merupakan opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku” (IAPI, 2021).

Menurut SA 705, “auditor harus memodifikasi opini ketika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Opini modifikasian terdiri dari opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*)” (IAPI, 2021).

Tabel 2. 1 Tipe Opini Modifikasian

Sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasi opini	Pertimbangan auditor tentang seberapa pervasif dampak atau kemungkinan dampak terhadap laporan keuangan	
	Material tetapi Tidak Pervasif	Material dan Pervasif
Laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak wajar
Ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat	Opini wajar dengan pengecualian	Opini tidak menyatakan pendapat

Sumber: SPAP SA 705 (2021)

Berdasarkan Tabel 2.1, pedoman pemberian opini modifikasian diberikan sesuai ketentuan berikut (IAPI, 2021):

1) “Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)”

“Auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian apabila:

- a) Setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan; atau
- b) Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif”.

2) “Opini tidak wajar (*adverse opinion*)”

“Auditor menyatakan opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan”.

3) “Opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*)”

“Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika:

- a) Auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.
- b) Pada kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait setiap ketidakpastian, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan”.

Berdasarkan SA 320, “konsep materialitas dalam audit mencakup beberapa hal, yaitu (IAPI, 2021):”

- a) “Kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material apabila kesalahan penyajian tersebut, baik secara individual maupun agregat diperkirakan dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan.
- b) Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian, atau kombinasi keduanya; dan
- c) Pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan keuangan individual tertentu, yang kebutuhannya beragam, tidak dipertimbangkan”.

Berdasarkan SA 705, “pervasif merupakan istilah yang digunakan dalam konteks kesalahan penyajian untuk menggambarkan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan atau kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, jika relevan, yang tidak dapat terdeteksi karena ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dampak pervasif terhadap laporan keuangan menurut pertimbangan auditor tidak terbatas pada unsur, akun, atau pos spesifik laporan keuangan; ketika dibatasi, merupakan atau dapat merupakan suatu proporsi substansial dari laporan keuangan; atau dalam hubungannya dengan pengungkapan bersifat fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan” (IAPI, 2021).

Berdasarkan SA 706, “contoh kondisi yang dianggap perlu oleh auditor untuk mencantumkan paragraf penekanan suatu hal, yaitu (IAPI, 2021):”

- 1) “Suatu ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh regulator.

- 2) Suatu peristiwa setelah tanggal pelaporan yang signifikan terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor.
- 3) Penerapan dini (jika diizinkan) atas suatu standar akuntansi baru yang berdampak material terhadap laporan keuangan.
- 4) Suatu bencana alam besar yang telah terjadi, atau masih berlanjut, berdampak signifikan terhadap posisi keuangan entitas”.

Berdasarkan SA 706, “paragraf hal lain diberikan jika menurut auditor perlu untuk mengkomunikasikan suatu hal lain selain yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang, menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor, selama hal ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan merupakan hal audit utama yang harus dikomunikasikan” (IAPI, 2021).

Berdasarkan SA 706, “kondisi yang dianggap perlu oleh auditor untuk mencantumkan paragraf hal lain, yaitu (IAPI, 2021):”

- 1) “Relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit seperti adanya pembatasan lingkup audit sehingga auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, dan auditor tidak dapat menarik diri dari penugasan.
- 2) Relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas tanggung jawab auditor atau laporan auditor seperti adanya peraturan atau praktik akuntansi yang berlaku umum dalam suatu yurisdiksi yang mengharuskan auditor menjelaskan lebih rinci terkait tanggung jawab auditor atau laporan auditor terkait.
- 3) Pelaporan atas lebih dari satu set laporan keuangan seperti klien membuat dua laporan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (Indonesia) dan *International Financial Reporting Standards (IFRS)*.
- 4) Pembatasan atas distribusi atau penggunaan laporan keuangan seperti laporan keuangan yang diaudit disusun untuk tujuan khusus pengguna tertentu”.

Menurut SA 706, “saat auditor mencantumkan paragraf Penekanan Suatu Hal dalam laporannya, auditor perlu (IAPI, 2021):”

- 1) “Mencantumkan paragraf tersebut sebagai paragraf terpisah dari laporan auditor dengan menggunakan judul “Penekanan Suatu Hal”.
- 2) “Mencantumkan dalam paragraf tersebut suatu pengacuan yang jelas tentang hal yang ditekankan dan acuan pada catatan atas laporan keuangan yang relevan yang mengungkapkan tempat hal tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan. Paragraf yang dicantumkan mengacu pada informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan”.
- 3) “Mengindikasikan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal yang ditekankan tersebut”.

Berdasarkan SA 706, “saat auditor mencantumkan paragraf Hal Lain dalam laporannya, auditor harus mencantumkan paragraf tersebut sebagai paragraf tersendiri dengan judul “Hal Lain”, atau judul lain yang tepat” (IAPI, 2021). Menurut SA 700, “bentuk baku pelaporan audit berdasarkan standar audit, yaitu (IAPI, 2021):”

- 1) “Judul”

Bagian laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen”.

- 2) “Pihak yang dituju”

“Bagian laporan auditor harus ditunjukkan kepada pihak yang tepat, sesuai dengan ketentuan perikatan”.

- 3) “Paragraf pendahuluan”

“Bagian laporan auditor harus mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas telah diaudit, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, serta menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan”.

- 4) “Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan”
“Bagian dari laporan auditor yang menjelaskan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Bagian ini mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan”.
- 5) “Tanggung jawab auditor”
“Bagian dari laporan auditor yang menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan auditor juga menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material”.
- 6) “Opini auditor”
“Bagian dari laporan auditor yang menyatakan pendapat yang dikeluarkan oleh auditor terhadap laporan keuangan yang diaudit. Saat menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus (kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan) menggunakan frasa berikut yaitu “Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
- 7) “Tanggung jawab pelaporan lainnya”
“Bagian dari laporan auditor yang menyatakan tanggung jawab pelaporan lainnya dalam laporan audit laporan keuangan merupakan tambahan

terhadap tanggung jawab berdasarkan SA untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul “Pelaporan Lain atas Ketentuan Hukum dan Regulasi”, atau judul lain yang dianggap tepat”.

- 8) “Tanda tangan auditor, tanggal laporan audit, serta alamat auditor juga harus dicantumkan dalam laporan auditor”.

Menurut SA 705, “bentuk dan isi laporan auditor ketika opini dimodifikasi sebagai berikut (IAPI, 2021):”

- 1) “Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Jika auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian, auditor perlu mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan modifikasi. Auditor harus menempatkan paragraf tersebut persis sebelum paragraf opini dalam laporan auditor dengan menggunakan judul “Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian”. Terkait paragraf opini, ketika auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian karena terdapat kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, auditor harus menyatakan dalam paragraf opini bahwa, menurut opini auditor, kecuali untuk dampak hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian dilengkapi dengan tambahan frasa berupa “Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”, ketika auditor melaporkan berdasarkan penyajian wajar. “Laporan keuangan telah disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”, ketika auditor melaporkan berdasarkan kerangka kepatuhan. Masih pada paragraf opini, apabila modifikasi ini timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, auditor harus menggunakan frasa “kecuali untuk kemungkinan dampak dari hal-hal...” untuk opini yang dimodifikasi”.

2) “Opini tidak wajar (*adverse opinion*)

Jika auditor menyatakan opini tidak wajar, auditor harus mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang dapat menyebabkan modifikasi tersebut. Auditor harus menempatkan paragraf tersebut persis sebelum paragraf opini dalam laporan auditor dan menggunakan sub judul “Basis untuk Opini Tidak Wajar”. Terkait paragraf opini, ketika auditor menyatakan suatu opini tidak wajar, auditor harus menyatakan bahwa, menurut opini auditor, karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak Wajar dilengkapi dengan tambahan frasa “Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”, ketika auditor melaporkan berdasarkan kerangka penyajian wajar. “Laporan keuangan, tidak disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”, ketika auditor melaporkan berdasarkan kerangka kepatuhan”.

3) “Opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer opinion*)

Jika auditor tidak menyatakan pendapat maka auditor harus mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor yang menyediakan suatu penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan modifikasi tersebut. Auditor harus menempatkan paragraf tersebut persis sebelum paragraf opini dalam laporan auditor dengan menggunakan sub judul “Basis untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat”. Terkait paragraf opini, auditor perlu menyatakan bahwa “Karena signifikansi hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Tidak menyatakan Pendapat, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit, dan oleh karena itu auditor tidak menyatakan opini atas laporan keuangan”.

Berdasarkan SA 570, “*going concern* merupakan asumsi bahwa suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi” (IAPI, 2021). Yusriwanti dan Mariyani (2019) menyatakan “dengan adanya *going concern*, suatu badan usaha dianggap mampu mempertahankan

kegiatan usahanya dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek”. “Para pemakai laporan keuangan umumnya sangat memperhatikan pernyataan yang diberikan auditor, di mana pernyataan audit merupakan salah satu gambaran atau penilaian auditor terhadap kondisi perusahaan apakah dapat bertahan hidup atau tidak untuk masa depan” (Tarihoran dan Ginting, 2017). “*Going concern* merupakan salah satu konsep penting yang melandasi pelaporan keuangan” (Rahmawati *et al.*, 2018).

Astari dan Latrini (2017) mendefinisikan opini audit *going concern* sebagai “opini audit yang dikeluarkan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usaha atau tidak”. “Opini audit *going concern* merupakan opini audit yang dimodifikasi atas penilaian ketidakmampuan atau ketidakpastian yang signifikan terhadap kelangsungan hidup perusahaan dalam melaksanakan operasinya untuk kurun waktu yang wajar atau tidak lebih dari satu tahun sejak laporan keuangan diaudit” (Abadi *et al.*, 2019)

Berdasarkan SA 570, “auditor bertanggung jawab memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya” (IAPI, 2021). Berdasarkan SA 570, “auditor harus melakukan prosedur penilaian risiko untuk mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya” (IAPI, 2021).

Berdasarkan SA 570, “peristiwa atau kondisi yang secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha sebagai berikut (IAPI, 2021):”

- 1) “Keuangan”
 - a) “Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih”.
 - b) “Pinjaman dengan waktu pengembalian tetap mendekati jatuh temponya tanpa prospek yang realistis atas pembaruan atau pelunasan; atau pengendalian yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk mendanai aset jangka panjang”.
 - c) “Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor”.
 - d) “Arus kas operasi yang negatif, yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif”.
 - e) “Rasio keuangan utama yang buruk”.
 - f) “Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas”.
 - g) “Dividen yang sudah lama terutang atau yang tidak berkelanjutan”.
 - h) “Ketidakmampuan untuk melunasi kreditor pada tanggal jatuh tempo”.
 - i) “Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman”.
 - j) “Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu dari transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman”.
 - k) “Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya”.
- 2) “Operasi”
 - a) “Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya”.
 - b) “Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian”.
 - c) “Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi, atau pemasok utama”.
 - d) “Kesulitan tenaga kerja”.
 - e) “Kekurangan penyediaan barang/bahan”.
 - f) “Munculnya kompetitor yang sangat berhasil”.

3) “Lain-lain”

- a) “Ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutori atau regulatori lainnya, seperti ketentuan solvabilitas atau likuiditas bagi institusi keuangan”.
- b) “Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kecil dapat dipenuhi oleh entitas”.
- c) “Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas”.
- d) “Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurang diasuransikan”.

Kurnia dan Mella (2018) menyatakan “dalam laporan tahunan, opini audit *going concern* diberikan setelah paragraf pendapat”. “Diberikannya opini audit *going concern* membantu publik maupun *shareholders* dalam menilai kondisi keuangan perusahaan. Laporan *going concern* memengaruhi reaksi dari pihak berkepentingan karena laporan ini mampu mengungkapkan informasi baru berkaitan dengan status dan rencana klien untuk meningkatkan kondisi keuangannya” (Menon dan Williams, 2010 dalam Astari dan Latrini, 2017). “Pengeluaran opini audit *going concern* berguna untuk membuat keputusan berinvestasi yang tepat karena kondisi keuangan perlu diketahui oleh semua pihak berkepentingan. Rahmawati *et al.* (2018) menyatakan “auditor bertanggung jawab untuk mengeluarkan opini audit *going concern* yang konsisten dengan keadaan sesungguhnya”.

Berdasarkan IAI (2021) dalam PSAK 1, “dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan perdagangan, atau tidak memiliki alternatif lain yang realistis selain melakukannya. Jika manajemen menyadari dalam membuat penilaiannya terkait adanya ketidakpastian material

sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Jika penyusunan laporan keuangan tidak berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut, bersama dengan dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dipertimbangkan sebagai entitas yang dapat menggunakan asumsi kelangsungan usaha". Menurut SA 570, "dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit" (IAPI, 2021).

Menurut SA 570, "suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensial dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk:"

- a) "Dalam hal kerangka pelaporan keuangan penyajian wajar, penyajian wajar atas laporan keuangan, atau
- b) Dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan" (IAPI, 2021).

Berdasarkan SA 570, "auditor memberikan pedoman pemberian opini audit terkait masalah kelangsungan usaha suatu perusahaan sebagai berikut (IAPI, 2021):"

- 1) "Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan:"
 - a) "Mengungkapkan memadai peristiwa/kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Rencana manajemen tersebut meliputi rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana atau

merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan; dan”

- b) “Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan, oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal”.
- 2) “Jika pengungkapan memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian, dan laporan perlu mencantumkan pada suatu paragraf terpisah dengan judul “Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha” untuk:
 - a) “Menarik perhatian pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) terkait adanya ketidakpastian material yang disebutkan di poin 1.
 - b) “Menyatakan peristiwa menunjukkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan bahwa opini auditor tidak dimodifikasi sesuai dengan hal tersebut”.
 - 3) “Jika pengungkapan memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya”.
 - 4) “Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar”.
 - 5) “Jika auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Namun, manajemen tidak bersedia melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor”.

“Auditor harus mempertimbangkan berbagai hal dalam pemberian opini, tidak terlepas dari keadaan ekonomi secara keseluruhan dan rencana perusahaan di masa yang akan datang” (Ariani, 2019). “Kelangsungan usaha suatu perusahaan selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. Para manajemen secara tidak langsung mempertanggungjawabkan kinerjanya” (Astari dan Latrini, 2017). Menurut SA 570, “pengevaluasian atas rencana manajemen terkait tindakan di masa depan dapat mencakup meminta keterangan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk, sebagai contoh, rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan” (IAPI, 2021).

“Variabel opini audit *going concern* diukur dengan variabel *dummy* yang akan diberi kode 1 apabila perusahaan menerima *Going Concern Audit Opinion (GCAO)* dan diberi kode 0 apabila menerima *Non Going Concern Audit Opinion (NGCAO)*” (Saputra dan Kustina, 2018).

2.1.6 Solvabilitas

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “*solvency ratios measure the ability of a company to survive over a long period of time*”. Jika diartikan “rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “solvabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya sampai mereka jatuh tempo”. “Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu mengelola utangnya serta mampu untuk melunasi kembali utangnya tepat waktu” (Fahmi, 2014 dalam Ariani, 2019). “Solvabilitas perusahaan penting karena mengharuskan perusahaan untuk melunasi seluruh pinjaman sesuai jumlah yang dipersyaratkan yang akan memengaruhi laporan keuangan” (Himam dan Masitoh, 2020).

Menurut Ross *et al.* (2017), “rasio solvabilitas dimaksudkan untuk mengatasi kemampuan jangka panjang perusahaan dalam memenuhi

kebutuhan kewajibannya. Rasio ini juga disebut *financial leverage ratios/leverage ratios*". Menurut Kasmir (2019), "rasio solvabilitas terbagi menjadi 5 rasio, yaitu:"

1) "*Debt to asset ratio*"

Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi antara *total debt* terhadap *total assets*".

2) "*Debt to equity ratio*"

"Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total modal perusahaan. Rasio ini dihitung dari membandingkan *total debt* terhadap *total equity*".

3) "*Long term debt to equity ratio*"

"Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Rasio ini dihitung dengan membandingkan *long term debt* dengan *total equity* perusahaan".

4) "*Times interest earned ratio*"

"Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan untuk membayar beban bunga pada saat jatuh tempo. Dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai dari *net income*, *interest expense*, dan *income tax expense* kemudian dibagi dengan *interest expense*".

5) "*Fixed charge coverage*"

"Rasio untuk mengukur kecukupan kas suatu perusahaan, dan sering digunakan sebagai ukuran kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban keuangan. Perbedaannya dengan *times interest earned ratio* adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa".

Dalam penelitian ini, rasio solvabilitas diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Menurut Abadi *et al.* (2019), "*debt to equity ratio* menunjukkan perbandingan antara total utang perusahaan dengan total ekuitas". Markonah *et al.* (2020), "*DER* adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur proporsi antara dana yang berasal dari kreditor dan pemilik perusahaan untuk mendanai aset”. “Jika *DER* kurang dari 1, proporsi penggunaan utang dalam struktur modal lebih kecil dibandingkan penggunaan modal. Sebaliknya, jika *DER* bernilai lebih dari 1, proporsi penggunaan utang dalam struktur modal lebih besar dibandingkan penggunaan modal” (Ross *et al.*, 2017).

Menurut Ukhriyawati dan Dewi (2019), “struktur modal dapat diukur dengan menggunakan *DER*”. Ross *et al.* (2017) mendefinisikan struktur modal sebagai “pencampuran antara utang dengan ekuitas yang dikelola oleh perusahaan”. Z.A *et al.* (2021) menyatakan bahwa “struktur modal merupakan proporsi penggunaan antara utang dan ekuitas. Manajemen sebagai pengelola perusahaan tentu harus dapat menyeimbangkan penggunaan utang dan ekuitas untuk mencapai struktur modal yang optimal”. Dua teori yang digunakan untuk memahami *leverage* adalah *trade-off theory* dan *pecking order theory*. Menurut Brigham dan Houston (2019), “terdapat *trade-off* dari keuntungan pajak yang didapatkan dari kebijakan pendanaan utang terhadap permasalahan yang disebabkan oleh potensi kebangkrutan”. “*Trade-off theory* menjelaskan keseimbangan akan diperoleh dari penggunaan utang, yaitu di mana ketika perusahaan dalam kegiatan operasinya menggunakan utang namun manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang jauh lebih besar dari jumlah utang yang diperbolehkan. Sebaliknya, ketika penggunaan utang tidak memberikan manfaat yang besar maka penambahan utang tidak diperbolehkan” (Anugerah dan Suryanawa, 2019). Berdasarkan Brigham dan Houston (2019), “beberapa pokok dari *trade-off theory*, yaitu:”

- a) “Beban bunga yang dibayarkan merupakan beban yang dapat dikurangkan membuat utang menjadi lebih rendah biaya dibandingkan dengan saham biasa maupun preferen. Pemerintah mengurangi *cost of debt* sehingga utang memberikan manfaat perlindungan pajak. Akibatnya, menggunakan lebih banyak utang mengurangi pajak sehingga memungkinkan lebih banyak *EBIT* mengalir ke investor”.

- b) “Dalam praktiknya, perusahaan mempunyai target rasio utang kurang dari 100% dalam membatasi dampak buruk dari potensi kebangkrutan”.
- c) “Terdapat batas tingkat penggunaan utang sehingga kemungkinan terjadinya kebangkrutan sangat rendah sehingga bersifat imaterial. Kemudian, terdapat tingkat penggunaan utang yang lebih tinggi sehingga biaya kebangkrutan mengurangi keuntungan pajak yang ditimbulkan oleh utang namun tidak seluruhnya menghapus keuntungan pajak sehingga harga saham tetap meningkat. Titik tersebut yang disebut titik optimal penggunaan *leverage*”.

Teori kedua adalah *pecking order theory*. “Pada *pecking order theory*, struktur modal dipengaruhi gagasan bahwa manajer memiliki *pecking order* yang disukai dalam menghimpun modal dan *pecking order* tersebut memengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. *Pecking order* merupakan urutan yang disukai oleh perusahaan dalam menghimpun modal yang pertama adalah pendanaan yang berasal dari utang dagang (*accounts payable*) dan akrual (*accruals*). Kemudian, saldo laba (*retained earnings*) yang dihasilkan pada periode berjalan. Jika, jumlah saldo laba tidak mencukupi kebutuhan modal, maka perusahaan akan menerbitkan utang. Perusahaan menerbitkan saham baru sebagai pilihan terakhir dari pendanaan perusahaan” (Brigham dan Houston, 2019).

Menurut Ross *et al.* (2017), “struktur modal optimal dari suatu perusahaan merupakan pencampuran ideal dari utang dan ekuitas dari sebuah perusahaan yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus meminimalkan keseluruhan biaya modalnya”. “Struktur modal perusahaan dapat memiliki struktur modal yang terdiri dari struktur modal with *minimal debt* atau struktur modal dengan *all-equity*. Struktur modal bergantung dengan jenis industri dari perusahaan karena standar dari struktur modal bervariasi antara industri satu dengan yang lain” (Athena, 2022). Kasmir (2019) menyebutkan “rumus *Debt to Equity Ratio (DER)* sebagai berikut:”

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

Debt to Equity Ratio (DER) = Rasio utang terhadap ekuitas

Total Debt = Total liabilitas/utang

Total Equity = Total ekuitas

Total *debt* merupakan total liabilitas dari perusahaan. Berdasarkan IAI (2019) dalam KKPK, “liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar dari entitas sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas diakui dalam laporan keuangan jika terdapat kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal”. Menurut IAI (2019) dalam KKPK, “liabilitas dapat menggunakan beberapa dasar pengukuran tertentu, yaitu:”

1) “Biaya historis (*historical cost*)”

“Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang timbul sebagai penukaran dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu (contohnya pajak penghasilan), pada sejumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal”.

2) “Biaya kini (*current cost*)”

“Liabilitas dicatat sebesar nilai penyelesaiannya, yaitu, jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini”.

3) “Nilai terealisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*)”

“Liabilitas dinyatakan sesuai nilai penyelesaian (yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diekspektasikan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal”.

4) “Nilai kini (*present value*)”

“Liabilitas dinyatakan sebesar arus kas keluar neto masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “berdasarkan jangka waktunya liabilitas terbagi menjadi 2, yaitu:”

1) “Kewajiban tidak lancar (*non-current liabilities*)”

“Kewajiban yang diekspektasikan perusahaan untuk dibayar setelah satu tahun. Contohnya adalah utang obligasi, wesel bayar, beberapa jumlah pajak penghasilan tangguhan, kewajiban sewa, dan kewajiban pensiun. Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi berjalan atau satu tahun sebagai kewajiban lancar apabila pembayaran kewajiban tersebut membutuhkan penggunaan aset lancar. Kewajiban tidak lancar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:”

- a) “Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi, kewajiban sewa guna usaha, dan *notes payable* jangka panjang”.
- b) “Kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun (*pension obligations*) dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan (*deferred income tax liabilities*)”.
- c) “Kewajiban yang bergantung pada kejadian atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerimaan pembayaran, atau tanggal yang harus dibayar, seperti jaminan layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi yang sering dikenal dengan *provisions*”.

2) “Kewajiban lancar”

“Kewajiban yang diharapkan perusahaan dapat dibayar dalam siklus operasi normal perusahaan atau dua belas bulan setelah tanggal laporan keuangan meliputi:”

- a) “Utang yang timbul dari perolehan barang dan jasa yang meliputi utang usaha, gaji dan upah, utang pajak penghasilan, dan sebagainya”.
- b) “Pendapatan diterima di muka untuk pengiriman barang atau kinerja layanan seperti pendapatan sewa yang belum diterima atau pendapatan langganan yang belum diterima”.

- c) “Kewajiban lain yang dilikuidasi akan terjadi dalam siklus operasi atau satu tahun, seperti bagian obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek yang timbul dari pembelian peralatan, atau estimasi kewajiban, seperti kewajiban jaminan atau provisi”.

Menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, “entitas mengklasifikasikan liabilitas jangka pendek jika:”

- a) “Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas dalam siklus normal”.
- b) “Entitas memiliki liabilitas untuk tujuan diperdagangkan”.
- c) “Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan”.
- d) “Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggihkan penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap liabilitas klasifikasi liabilitas tersebut”.

Kieso *et al.* (2018) menjelaskan “beberapa contoh jenis utang jangka pendek, yaitu:”

- a) “*Accounts payable* adalah saldo utang kepada pihak lain atas pembelian barang, persediaan, atau jasa”.
- b) “*Notes payable* adalah perjanjian tertulis untuk membayarkan sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan”.
- c) “*Current maturities of long-term debt* adalah bagian dari obligasi, wesel bayar, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya”.
- d) “*Short-term obligations expected to be refinanced* adalah kewajiban jangka pendek yang diekspektasikan akan dibiayai kembali”.
- e) “*Dividend payables* adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai hasil otorisasi dewan direksi”.

- f) “*Customer advances and deposits* adalah penerimaan deposit dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak/layanan perusahaan/sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan”.
- g) “*Unearned revenues* adalah kewajiban yang timbul akibat perusahaan telah menerima pembayaran terlebih dahulu namun belum melakukan pelaksanaan kewajibannya”.
- h) “*Sales and value-added taxes payable* adalah kewajiban pajak yang timbul akibat transaksi jual dan beli”.
- i) “*Income taxes payable* adalah kewajiban pajak atas penghasilan yang didapat perusahaan”.
- j) “*Employee-related liabilities* adalah jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi”.

Kieso *et al.* (2018) menjelaskan “beberapa contoh jenis utang jangka panjang, yaitu:”

- a) “*Bonds payable* adalah bentuk dari utang wesel yang berbunga”.
- b) “*Mortgage notes payable* adalah sebuah utang jangka panjang yang dijaminan terhadap *real estate*”.
- c) “*Long-term notes payable* adalah utang wesel yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari satu tahun”.
- d) “*Lease liabilities* adalah kewajiban yang muncul akibat perjanjian kontrak antara pemberi sewa yaitu *lessor* atau pemilik properti dengan penyewa yaitu *lessee*/peminjam properti”.
- e) “*Pension liabilities* adalah kewajiban yang timbul akibat dari pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat (pembayaran) kepada pensiunan karyawan untuk layanan yang mereka lakukan selama tahun kerja mereka”.

Berdasarkan Weygandt *et al.* (2019), “beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan menggunakan utang sebagai pendanaan, yaitu:”

- 1) “Kendali pemegang saham tidak akan berpengaruh karena kreditor tidak memiliki hak suara sehingga pemegang saham dapat mempertahankan kendali atas perusahaannya secara penuh”.
- 2) “Beban bunga yang timbul dari utang merupakan biaya pengurang dalam pajak sementara dividen bukan merupakan biaya pengurang pajak”.
- 3) “Walaupun beban bunga yang timbul dari utang dapat mengurangi laba bersih, laba per saham akan menjadi lebih tinggi ketika menggunakan utang”.

Berdasarkan Weygandt *et al.* (2019), “kerugian utama pembiayaan dengan menggunakan utang adalah bahwa perusahaan harus membayar bunga secara periodik. Selain itu, perusahaan juga harus membayar kembali pokok utang pada saat jatuh tempo”. Menurut Palepu *et al.* (2019), “ketergantungan pada pembiayaan dengan menggunakan utang berpotensi merugikan pemegang saham perusahaan. Perusahaan akan kesulitan keuangan jika gagal membayar bunga dan pokok. Pemegang utang juga memberlakukan perjanjian pada perusahaan, membatasi keputusan operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan”.

“Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas. Walau didefinisikan sebagai residual, ekuitas dapat disubklasifikasi pada laporan posisi keuangan. Contohnya pada perseroan terbatas, setoran modal para pemegang saham, saldo laba, penyisihan saldo laba dari penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal dapat disajikan secara terpisah. Klasifikasi ini menjadi relevan dalam kebutuhan pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan ketika terdapat indikasi pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan entitas untuk mendistribusikan atau menggunakan ekuitasnya. Klasifikasi ini juga dapat merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikan pada entitas memiliki hak berbeda terkait penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal yang telah disetorkan” (IAI, 2019 dalam KKPK). “Sumber

utama (peningkatan) ekuitas adalah investasi oleh pemegang saham dan pendapatan dari operasi bisnis. Sebaliknya, pengurangan (penurunan) ekuitas dihasilkan dari beban dan dividen” (Weygandt *et al.*, 2019).

Berdasarkan Kieso *et al.* (2018), “ekuitas merupakan total aset dikurangi dengan total kewajiban yang terdiri dari:”

- 1) “*Share capital ordinary* menggambarkan jumlah yang disetor (kas dan aset lain) oleh pemegang saham untuk saham biasa yang dibeli. Pada ekuitas, jumlah saham resmi yang dilaporkan adalah *authorized shares*. *Authorized shares* yaitu jumlah saham yang diizinkan untuk dijual oleh suatu perusahaan. Selain itu, terdapat saham perusahaan yang diterbitkan dan dimiliki para investor publik yaitu *outstanding shares*. Saham yang diterbitkan perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan kepemilikan, yaitu *ordinary shares* dan *preferences shares*. Saham biasa (*ordinary shares*) merupakan saham yang mewakili kepentingan perusahaan yang menanggung risiko kerugian tertinggi dan menerima manfaat dari keberhasilan, serta tidak ada jaminan dividen atau aset ketika likuidasi. Saham preferen (*preference shares*) yaitu saham yang diciptakan dari kontrak khusus antara perusahaan dengan pemegang saham”.
- 2) “*Share premium* merupakan kelebihan jumlah yang dibayarkan di mana jumlah yang dibayarkan berada di atas nilai par atau nilai nominal yang dinyatakan”.
- 3) “*Retained earnings* merupakan laba perusahaan yang tidak didistribusikan”.
- 4) “*Accumulated other comprehensive income* merupakan jumlah agregat dari penghasilan komprehensif lain”.
- 5) “*Treasury shares* merupakan jumlah saham biasa yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali dari pemegang saham”.
- 6) *Non-controlling interest (minority shares)* merupakan sebagian hak anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”.

Berdasarkan Weygandt *et al.* (2019), “*retained earnings* ditentukan dari 3 komponen, yaitu”:

- a) “Pendapatan yaitu kenaikan bruto ekuitas yang dihasilkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan untuk tujuan memperoleh pendapatan. Pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap ekuitas, peningkatan ekuitas diikuti dengan peningkatan aset/penurunan kewajiban. Secara umum, diperoleh dari menjual barang dagangan, melakukan jasa, menyewa properti, dan meminjamkan uang”.
- b) “Beban yaitu biaya atas aset yang digunakan/jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Beban memiliki pengaruh negatif terhadap ekuitas. Penurunan yang terjadi di ekuitas diikuti dengan penurunan aset atau peningkatan pada kewajiban”.
- c) “Dividen, pendapatan bersih yaitu peningkatan aset bersih yang kemudian tersedia untuk dibagikan ke pemegang saham. Pembagian atas uang tunai /aset lainnya kepada pemegang saham disebut dengan dividen. Perusahaan akan menentukan terlebih dahulu pendapatan dan bebannya, lalu menghitung laba bersih/rugi bersih. Jika memiliki laba bersih, dan memutuskan untuk tidak digunakan bagi kepentingan perusahaan, perusahaan dapat memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemiliknya (pemegang saham)”.

“Penggunaan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan perusahaan memiliki kelebihan seperti kemudahan dalam mendapatkan dana, tidak dibatasi berbagai ketentuan dan persyaratan, waktu pengembalian dana tidak terbatas, dan tidak ada beban untuk membayar angsuran, bunga, maupun biaya lainnya. Kekurangan penggunaan modal yaitu jumlahnya yang terbatas karena mengandalkan modal pribadi pemilik terutama apabila dana yang dibutuhkan cukup besar” (Hery, 2017).

Putri (2016) dalam Prayoga dan Sinaga (2021) menyatakan “apabila sebuah perusahaan memiliki rasio solvabilitas yang tinggi atau biasa disebut tidak *solvable* cenderung memiliki utang yang tinggi pula. Hal ini akan meningkatkan risiko yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan, terutama

dalam hal pembayaran utang dan bunga”. “*Debt default* yaitu kegagalan debitur (perusahaan) dalam membayar utang pokok dan bunganya pada waktu jatuh tempo” (Oktaviani dan Challen, 2020). “Semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin menunjukkan kinerja keuangan perusahaan buruk dan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih berpeluang mendapatkan opini audit *going concern*” (Rudyawan dan Badera, 2009 dalam Jalil, 2019).

“*DER* merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mengembalikan utang terhadap modal. Auditor akan melihat sisi pendanaan perusahaan lebih banyak menggunakan utang atau modal. Utang didapat dari kreditor baik utang jangka panjang maupun jangka pendek. Perusahaan meminjam dana pada kreditor sehingga perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut. Semakin tinggi utang perusahaan, maka kewajiban perusahaan untuk melunasi utang juga semakin tinggi” (Haryanto dan Sudarno, 2019). Menurut Oktaviani dan Challen (2020), “sebuah perusahaan dapat dikategorikan *default* utangnya bila salah satu kondisi ini terpenuhi seperti perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar utang pokok atau bunga, persetujuan perjanjian utang yang dilanggar atau jika pelanggaran perjanjian tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang dari satu tahun, serta perusahaan sedang dalam proses negosiasi restrukturisasi utang yang jatuh tempo”.

“Tingkat *DER* yang tinggi meningkatkan risiko auditor mengeluarkan opini audit *going concern* karena kondisi tersebut mencerminkan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan akibat sebagian besar dana yang dimiliki dialokasikan untuk membayar kewajiban perusahaan” (Pasaribu, 2015 dalam Putranto, 2018). Menurut SA 570, “ketidakmampuan untuk melunasi kreditor pada tanggal jatuh tempo menjadi salah satu peristiwa atau kondisi yang baik secara individu atau kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha” (IAPI, 2021). Dapat disimpulkan bahwa semakin besar rasio *DER*,

maka semakin besar kemungkinan auditor untuk mengeluarkan opini audit *going concern*.

Hasil penelitian Abadi *et al.* (2019) dan Simanjuntak *et al.* (2020) menemukan bahwa “rasio solvabilitas yang diproksikan dengan *DER* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*”. Berbeda dengan penelitian Putranto (2018) yang menyatakan bahwa “rasio solvabilitas yang diproksikan dengan *DER* tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*”. Berdasarkan penjelasan mengenai rasio solvabilitas yang diukur dengan *DER* dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*, maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

***Ha₁* : Solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.**

2.1.7 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Menurut Soewiyanto (2012) dalam Rahmawati *et al.* (2018), “opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima oleh perusahaan pada tahun sebelumnya atau satu tahun sebelum penelitian”. “Situasi penyebab perusahaan menerima opini audit *going concern* tahun sebelumnya seperti menurunnya harga saham, kesulitan memperoleh pinjaman, dan keraguan dari *stakeholder* terhadap kinerja perusahaan” (Halim, 2021).

“*Auditee* yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya dianggap memiliki masalah dalam kelangsungan hidup di mana terdapat kesangsian terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha untuk tahun ke depan sehingga auditor akan mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan” (Anisa, 2013 dalam Astari dan Latrini, 2017). Menurut Pratiwi dan Lim (2018), “jika perusahaan menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya maka akan menjadi pertimbangan bagi auditor dalam memberikan opini yang sama di tahun berjalan”.

“Berjalannya aktivitas ekonomi pada tahun tertentu tidak terlepas dari kondisi tahun sebelumnya. Jika sudah memperoleh opini audit *going concern*

pada periode sebelumnya, maka pada tahun berjalan perusahaan harus lebih berhati-hati agar tidak kembali menerima opini yang sama. Hal ini terjadi jika auditor menilai belum ada tindakan dari manajemen terkait perbaikan kinerja perusahaan” (Halim, 2021). Andrian *et al.* (2019) menyatakan “opini audit tahun sebelumnya diukur dengan variabel *dummy* dengan ketentuan sebagai berikut:”

- a) “1: Menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya”.
- b) “0: Tidak menerima opini audit *non going concern* di tahun sebelumnya”.

“Apabila perusahaan mampu meningkatkan performadi tahun berjalan maka perusahaan tidak akan menerima opini audit *going concern*. Namun, jika perusahaan tidak mampu meningkatkan performa di tahun berjalan maka kemungkinan besar perusahaan akan menerima opini audit *going concern* seperti tahun sebelumnya” (Pratiwi dan Lim, 2018). “Perusahaan yang mendapatkan opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya, memiliki kecenderungan untuk mengalami permasalahan baru di tahun berjalan, seperti berkurangnya kepercayaan publik, akhirnya akan semakin mempersulit manajemen perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika perusahaan tidak berhasil menunjukkan peningkatan signifikan di tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka perusahaan akan mendapatkan opini audit *going concern* kembali” (Kartika, 2012 dalam Pratiwi dan Lim, 2018). Dapat disimpulkan, jika perusahaan menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menerima opini audit *going concern* pada tahun berikutnya.

Hasil penelitian Ginting dan Tarihoran(2017), Pratiwi dan Lim (2018), dan Halim (2021) menemukan bahwa “opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*”. Berbeda dengan penelitian Syahputra dan Yahya (2017), Rizkillah dan Nurbaiti (2018), dan Shulhiyyah *et al.* (2019) menyatakan bahwa “opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*”. Berdasarkan penjelasan mengenai opini audit tahun sebelumnya yang diukur dengan

menggunakan variabel *dummy* dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*, maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

Ha₂ : Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit going concern.

2.1.8 Profitabilitas

Harahap (2013) dalam Ariani (2019) menyatakan “rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada”. Hidayat (2018) dalam Himam dan Masitoh (2020) menyatakan “*profitability is a measuring tool to determine the company’s ability to generate profits in relation to sales, assets, and own shares*”. Dapat diartikan “profitabilitas merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, aset, dan ekuitas perusahaan”.

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “rasio profitabilitas dipakai untuk mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan Brigham dan Houston (2019), “profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan efek gabungan dari likuiditas, manajemen, aset, dan utang pada hasil operasi perusahaan. Ross *et al.* (2017) menyatakan “rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya dalam mengelola kegiatan operasional dan berfokus pada laba bersih”. “Tingkat profitabilitas perusahaan dengan hasil positif menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba, sedangkan tingkat profitabilitas yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian” (Himam dan Masitoh, 2020).

“Laba memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan baik melalui utang maupun ekuitas. Selain itu, laba juga berpengaruh terhadap posisi likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh. Kreditor maupun investor tertarik untuk mengevaluasi kekuatan laba yang disebut profitabilitas. Dalam analisis, profitabilitas sering digunakan

sebagai alat untuk menguji efektivitas manajemen dalam operasi perusahaan” (Weygandt *et al.*, 2019).

Berdasarkan Weygandt *et al.* (2019), “terdapat beberapa rasio untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan, yaitu:”

- 1) “*Profit margin*, rasio yang mengukur persentase setiap penjualan yang menghasilkan laba bersih perusahaan. Rasio dihitung dengan membagi *net income* dengan *net sales*”.
- 2) “*Asset turnover*, rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata aset”.
- 3) “*Return on assets*, rasio yang mengukur seberapa efisien aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio dihitung dengan cara membagi *net income* dengan *average total assets*”.
- 4) “*Return on ordinary shareholders’ equity*, rasio yang mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan besarnya *net income* yang diperoleh perusahaan untuk setiap uang yang diinvestasikan oleh pemilik. Rasio dihitung dengan membagi *net income available to ordinary shareholders* dengan *ordinary shareholders’ equity*”.
- 5) “*Earning per share*, rasio yang mengukur *net income* yang diperoleh dari setiap lembar saham biasa. Rasio dihitung dengan cara membagi *net income available to ordinary shareholders* dengan *weighted-average ordinary shares outstanding* selama tahun berjalan”.
- 6) “*Price-earnings ratio*, rasio yang menggambarkan penilaian investor atas pendapatan masa depan perusahaan. Rasio dihitung dengan membagi *market price per shares* dengan *earnings per share*”.
- 7) “*Payout ratio*, rasio yang mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Rasio dihitung dengan membagi *cash dividend declared on ordinary shares* dengan *net income*”.

Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)*. Menurut Kieso *et al.* (2018), “*return on assets* merupakan laba yang dicapai perusahaan melalui penggunaan asetnya”. Suprpto dan Aini (2019) menjelaskan bahwa “*ROA* digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba”. Berdasarkan Sinaga (2019), “tinggi rendahnya *ROA* tergantung pada pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen yang menggambarkan efisiensi dari operasional perusahaan”. Menurut Weygandt *et al.* (2019), “rumus *return on assets* sebagai berikut:”

$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Return on Assets = Tingkat pengembalian aset

Net Income = Laba bersih tahun berjalan

Average Total Assets = Rata-rata total aset

Menurut Weygandt *et al.* (2019), rumus *average total assets* sebagai berikut:

$$\text{Average Total Assets} = \frac{\text{Total Assets}_t + \text{Total Assets}_{t-1}}{2} \quad (2.3)$$

Keterangan:

Average Total Assets = Rata-rata jumlah aset perusahaan

Total Assets_t = Total aset pada tahun t

Total Assets_{t-1} = Total aset setahun sebelum tahun t

Menurut Kieso *et al.* (2018), “komponen-komponen dan langkah pembentukan *net income* dalam *income statement* perusahaan sebagai berikut:”

- 1) “Pendapatan, adalah jumlah pendapatan neto yang terdiri atas penjualan (*sales*), setelah dikurangi diskon (*sales discount*) dan retur penjualan (*sales return and allowance*). *Sales revenue (sales)* merupakan sumber utama pendapatan perusahaan, yang dihasilkan dari menjual produk. *Sales discount* menjadi pengurangan harga yang diberikan oleh penjual. *Sales discount* diberikan ketika membeli barang secara tunai dalam jumlah

besar, melunasi utang sebelum jatuh tempo atau lebih cepat dari waktu dalam syarat pembayaran. *Sales return and allowance* adalah transaksi di mana penjual menerima barang kembali dari pembeli (*sales return*) atau memberikan pengurangan dalam harga beli (*sales allowance*) sehingga pembeli akan menyimpan barang. Biasa terjadi saat pembeli tidak puas dengan barang yang dibeli karena rusak/cacat, berkualitas rendah atau tidak memenuhi spesifikasi sehingga penjual akan memberikan potongan harga”.

- 2) “Setelah itu, pendapatan akan dikurangi dengan harga pokok penjualan yang menunjukkan beban/biaya penjualan yang berkaitan langsung dalam menghasilkan penjualan selama periode pelaporan dan menghasilkan laba bruto/laba kotor”. “Harga pokok penjualan yaitu harga pokok barang jadi dalam persediaan yang dijual kepada pelanggan selama periode akuntansi berjalan yang diperoleh dengan menambahkan nilai *Cost of Goods Manufactured (COGM)* periode tahun berjalan dengan nilai persediaan barang jadi awal tahun periode dan dikurangi dengan nilai persediaan barang jadi akhir periode” (Horngren *et al.*, 2018). “Laba kotor (*gross profit*) digunakan karena belum memperhitungkan beban operasional yang dikeluarkan dalam rangka penciptaan/pembentukan pendapatan” (Hery, 2017).
- 3) “Laba bruto dikurangi *operating expenses* serta ditambah/dikurangi dengan *other income and expense* akan menghasilkan laba operasional (*income from operations*)”. *Operating expenses* yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses mendapatkan penghasilan pendapatan dari penjualan”. *Operating expenses* terdiri dari *selling expenses*, *administrative or general expenses*, dan *other expenses*. “*Selling expenses* adalah beban yang terjadi akibat upaya perusahaan mendapat penjualan selama periode pelaporan. *Administrative and general expenses* berisi informasi beban administrasi umum selama periode pelaporan. *Other income and expenses* mencakup transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan beban yang telah disebut sebelumnya seperti

berupa keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga” (Kieso *et al.*, 2018). “Beban penjualan adalah beban yang berkaitan langsung dengan segala aktivitas yang mendukung penjualan barang dagangan seperti beban gaji divisi penjualan, komisi penjualan, pengiriman barang, iklan, dan penyusutan peralatan toko. Beban umum dan administrasi berupa aktivitas administrasi kantor dan operasi umum seperti beban gaji karyawan, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban penyusutan peralatan kantor” (Hery, 2017). “*Income from operations* merupakan penghasilan perusahaan yang didapatkan dari operasi normal” (Kieso *et al.*, 2018).

- 4) “Laba operasional (*income from operations*) dikurangi dengan *financing cost* akan menghasilkan laba sebelum pajak (*income before income taxes*). *Financing cost* merupakan beban pembiayaan perusahaan yang biasa disebut beban bunga (*interest expense*). *Income tax* yaitu pajak yang dikenakan atas pendapatan sebelum pajak penghasilan”.
- 5) “Laba sebelum pajak (*income before income taxes*) dikurangi dengan *income taxes* akan menghasilkan *income from continuing operations*”. *Income from continuing operations* adalah penghasilan perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari kegiatan operasi yang dihentikan”.
- 6) “Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan/kerugian yang dihasilkan dari pemberhentian kegiatan operasi perusahaan, maka laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan (*income taxes*) akan menghasilkan laba tahun berjalan (*net income*). *Discontinued operations* merupakan keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan dari disposisi komponen dalam sebuah perusahaan”.
- 7) Terakhir, *non-controlling interest* merupakan komponen yang menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan *non-pengendali* (kepentingan minoritas), serta *earnings per share* yaitu laba yang diperoleh dari setiap saham biasa”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “*net income* adalah penghasilan setelah semua pendapatan dan biaya untuk periode tersebut diperhitungkan”. “Laporan laba rugi mencantumkan pendapatan dahulu, diikuti oleh biaya. *Net income* merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama satu periode waktu. Saat pendapatan lebih tinggi daripada biaya maka timbul laba bersih (*net income*). Ketika beban melebihi pendapatan maka akan menimbulkan *net loss*” (Weygandt *et al.*, 2019).

Berdasarkan IAI (2019) dalam KKPK, “penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan pada ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (*income*) terdiri dari pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*)”. Menurut Kieso *et al.* (2018), “pendapatan adalah arus masuk peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya (atau kombinasi keduanya) selama periode pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau pusat entitas yang sedang berjalan”. “Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti, dan sewa” (IAI, 2019 dalam KKPK). Menurut Kieso *et al.* (2018), “terdapat 5 langkah dalam proses pengakuan pendapatan, yaitu:”

- 1) “Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan”.
- 2) “Mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak”.
- 3) “Menentukan harga transaksi”.
- 4) “Mengalokasikan harga transaksi kewajiban kinerja secara terpisah”.
- 5) “Mengakui pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja terpenuhi”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “keuntungan yaitu peningkatan ekuitas (aset bersih) dari transaksi periferal atau insidental dari suatu entitas dan dari semua transaksi lain serta peristiwa dan keadaan lain yang memengaruhi entitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik”. “Penghasilan mencakup keuntungan yang belum

direalisasi; sebagai contoh yang timbul dari dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (*marketable*) dan dari kenaikan jumlah tercatat aset tidak lancar. Keuntungan ditampilkan secara terpisah ketika diakui dalam laporan laba rugi karena informasi tersebut berguna dalam membuat keputusan ekonomi. Keuntungan sering dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi beban yang bersangkutan” (IAI, 2019 dalam KKPK).

Berdasarkan Weygandt *et al.* (2019), “beban merupakan biaya yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses pendapatan penghasilan”. Menurut IAI (2019) dalam KKPK, “beban mencakup kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan entitas yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas seperti beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban berbentuk arus kas keluar seperti berkurangnya aset, contohnya seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap”.

Menurut IAI (2019) dalam KKPK, “kerugian mempresentasikan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas yang biasa. Kerugian mempresentasikan menurunnya manfaat ekonomi, dan dengan demikian sifatnya tidak berbeda dari beban lainnya sehingga tidak dianggap sebagai unsur yang terpisah. Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran dan kebakaran, seperti juga yang timbul dari pelepasan aset tidak lancar”. “Definisi beban juga mencakup rugi yang belum direalisasi, sebagai contoh, rugi yang timbul dari pengaruh kenaikan kurs valuta asing dari pinjaman entitas dalam mata uang tersebut. Biasanya kerugian ditampilkan secara terpisah ketika diakui dalam laporan laba rugi karena informasi tersebut berguna dalam membuat keputusan ekonomi. Kerugian sering dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan” (IAI, 2019 dalam KKPK).

Menurut IAI (2019) dalam KKPK, “aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas”. “Aset yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan asetnya untuk melakukan aktivitas produksi dan penjualan. Ciri umum semua

aset adalah kemampuan untuk memberikan layanan atau manfaat di masa depan. Dalam kegiatan bisnis, layanan atau manfaat di masa depan pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk (penerimaan)” (Weygandt *et al.*, 2019).

“Total aset yang digunakan dapat berupa aset pada awal tahun, akhir tahun, atau rata-rata saldo awal dan akhir dalam satu tahun. Penggunaan nilai rata-rata dianggap paling tepat karena dapat menghilangkan fluktuasi antara nilai awal dan akhir pada total aset” (Palepu *et al.*, 2019). “Total aset di dalam laporan posisi keuangan yaitu jumlah keseluruhan aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi” (Kieso *et al.*, 2018). Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset lancar terdiri dari persediaan (*inventories*), beban dibayar di muka (*prepaid expenses*), piutang (*receivables*), investasi jangka pendek (*short term investment*), serta kas dan setara kas (*cash and cash equivalent*)”.

Berdasarkan Kieso *et al.* (2018), “persediaan merupakan salah satu aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis, atau barang yang akan digunakan/konsumsi dalam proses produksi barang untuk dijual. Investasi dalam persediaan biasanya merupakan aset lancar dengan nilai terbesar pada bisnis retail (*merchandising*). Pada bisnis retail, biasanya pembelian persediaan sudah dalam bentuk siap dijual, dan biaya barang yang masih ada di tangan dicatat sebagai *merchandise inventory*. Pada bisnis manufaktur, terdapat 3 akun pencatatan persediaan, yaitu persediaan barang mentah (*raw materials inventory*) yang merupakan biaya persediaan yang belum masuk proses produksi, persediaan dalam proses (*work in process inventory*) yang merupakan biaya persediaan yang sebagian sudah masuk proses produksi namun belum tercipta barang jadi, dan persediaan barang jadi (*finished goods inventory*)”.

Menurut Kieso *et al.* (2018), “piutang (*receivables*) adalah klaim yang ditahan terhadap pelanggan dan lainnya atas utang barang dan jasa yang dikategorikan menjadi *trade receivables* dan *non-trade receivables*. *Trade receivables* terjadi ketika pelanggan sering berutang atas barang yang dibeli

atau jasa yang diberikan yang biasanya terdiri dari *accounts receivables* dan *notes receivable*. *Accounts receivables* adalah janji pembeli secara lisan untuk membayar barang atau jasa yang dijual dalam jangka waktu yang singkat, sekitar 30-60 hari. *Notes receivable* adalah perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan”. “*Non-trade receivables* muncul dari transaksi seperti piutang pada karyawan, kepada anak perusahaan, piutang dividen, piutang bunga, deposito yang dibayarkan untuk menutupi kerusakan atau kehilangan, dan piutang lain-lain” (Kieso *et al.*, 2018).

Menurut Weygandt *et al.* (2019), “biaya dibayar di muka (*prepaid expenses*) terjadi ketika perusahaan mencatat beban yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sehingga aset akan tercatat sebagai *prepaid expenses* atau *prepayments*. Apabila suatu beban telah dibayarkan terlebih dahulu, maka akun aset akan meningkat untuk menunjukkan bahwa jasa /manfaat yang akan diterima perusahaan di masa mendatang. Contohnya seperti asuransi, perlengkapan, periklanan, dan sewa”. “Investasi jangka pendek (*short-term investments*) adalah investasi yang bersifat sangat likuid dan siap dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang dapat diketahui serta hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan nilai yang timbul akibat perubahan suku bunga tidak signifikan. Contohnya seperti obligasi negara, *commercial paper*, dan dana dari pasar uang” (Kieso *et al.*, 2018).

Menurut Kieso *et al.* (2018), “kas adalah aset paling likuid yang menjadi standar media pertukaran dan dasar untuk mengukur dan menghitung seluruh item lainnya yang terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia dalam rekening bank. Kas dan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam jumlah yang diketahui dan sangat dekat jatuh temponya sehingga menimbulkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan misalnya karena perubahan suku bunga”. “Persediaan dicatat berdasarkan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya (*net*), biaya dibayar di muka berdasarkan *cost*-nya, piutang dicatat berdasarkan perkiraan jumlah tertagih, investasi jangka pendek, serta kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai wajar” (Kieso *et al.*, 2018).

Menurut Kieso *et al.* (2018), “aset tidak lancar (*non-current assets*) adalah jenis aset yang tidak termasuk dalam definisi aset lancar. Aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang (*long-term investments*), *property, plant, and equipment*, aset tak berwujud (*intangible assets*), dan aset lainnya (*other asset*). Investasi jangka panjang (*long-term investments*), investasi jangka panjang umumnya terdiri dari investasi pada saham dan obligasi perusahaan lain yang biasanya dimiliki selama bertahun-tahun, aset jangka panjang seperti tanah atau bangunan yang saat ini tidak digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional, dan *long-term notes receivable*”. “*Property, plant, and equipment* yaitu aset dengan umur manfaat yang relatif panjang yang digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnis saat ini. Kategori ini meliputi tanah, bangunan, mesin dan perlengkapan, perlengkapan pengiriman, dan *furniture*. *Property, plant and equipment* terkadang disebut aset tetap” (Weygandt *et al.*, 2019). “Aset ini terdiri dari *physical property* seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, alat, dan *wasting resources (minerals)*. Terkecuali tanah, perusahaan mendepresiasi atau mendepleksikan aset-aset tersebut” (Kieso *et al.*, 2018).

“*Intangible assets* (aset tidak berwujud), aset perusahaan yang berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik namun berharga. Salah satu aset tidak berwujud yang signifikan adalah *goodwill*. Paten, hak cipta, dan merek dagang atau nama dagang yang memberi perusahaan hak penggunaan eksklusif untuk jangka waktu tertentu” (Weygandt *et al.*, 2019). “Perusahaan melakukan amortisasi terhadap *limited-life intangible assets* sepanjang masa manfaatnya. Aset lainnya (*other assets*), aset yang bervariasi seperti biaya dibayar di muka jangka panjang dan piutang tidak lancar. Contohnya *long-term prepaid expenses* dan *non-current receivables* seperti aset dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual dan *restricted cash*” (Kieso *et al.*, 2018).

Berdasarkan IAI (2021) dalam PSAK 16, “aset tetap adalah aset berwujud yang:”

- 1) “Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan”

2) “Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

“Hubungan profitabilitas dengan opini audit *going concern* adalah semua perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan laba dengan semua sumber daya yang dimiliki, di mana nantinya laba yang dihasilkan akan digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan” (Wahasusmiah *et al.*, 2019). “Rendahnya profitabilitas sebuah perusahaan, maka semakin rendah juga kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang mengakibatkan keraguan auditor untuk memberikan opini *going concern*” (Nugroho *et al.*, 2018).

Menurut Sari (2020), “keberlangsungan usaha sebuah perusahaan dapat dinilai dari faktor internal yang biasanya dikaitkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola semua sumber daya yang dimiliki perusahaan agar mampu membayar utang-utangnya dan meningkatkan penjualannya agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang ketat secara berkelanjutan”. “Semakin rendah *ROA* perusahaan maka mencerminkan semakin buruk kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sehingga penerimaan opini audit *going concern* mengalami peningkatan karena perusahaan tidak mampu secara efektif dan efisien mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Dengan kondisi tersebut, auditor berkemungkinan mengeluarkan opini audit *going concern*, karena menganggap bahwa perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah cenderung memiliki laba yang relatif rendah sehingga dianggap menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya” (Angel dan Sumantri, 2018). Menurut SA 570, “arus kas operasi negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis dan prospektif yang dapat berdampak pada kegiatan operasional seperti tidak dapat membagikan dividen, kekurangan penyediaan barang/bahan, dan kesulitan tenaga kerja menjadi kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha” (IAPI, 2021). Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil *ROA*, maka semakin besar kemungkinan auditor mengeluarkan opini audit *going concern*.

Hasil penelitian Rahman dan Ahmad (2018) serta Irwanto dan Tanusdjaja (2020) menemukan bahwa “rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* berpengaruh secara negatif terhadap opini audit *going concern*”. Berbeda dengan penelitian Juanda dan Lamur (2021), Sari dan Handayani (2022) yang menemukan bahwa “rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *ROA* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*”. Berdasarkan penjelasan mengenai rasio profitabilitas yang diukur dengan menggunakan *ROA* dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*, maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

***Ha₃* : Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*.**

2.1.9 Disclosure

Berdasarkan IAI (2021) dalam PSAK 5, “entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi”. “*Disclosure* adalah pengungkapan atau penjelasan, pemberian informasi oleh perusahaan, baik yang positif maupun yang negatif, yang mungkin berpengaruh atas suatu keputusan investasi. *Disclosure* dibutuhkan oleh para pengguna untuk lebih memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan” (Saputra dan Kustina, 2018). “Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan untuk melindungi hak pemegang saham yang cenderung terabaikan akibat terpisahnya pihak manajemen yang mengelola perusahaan dan pemegang saham yang memiliki modal. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan memadai untuk memungkinkan dilakukannya prediksi kondisi keuangan, arus kas, dan profitabilitas di masa depan” (Pratiwi dan Palupi, 2017). “Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat. Perusahaan diharapkan dapat lebih transparan dalam mengungkapkan informasi keuangan, sehingga dapat

membantu para pengambil keputusan yaitu pengguna laporan keuangan” (Mariana *et al.*, 2018).

Menurut Hendriksen dan Breda (2002) dalam Saputra dan Kustina (2018), “terdapat 3 konsep pengungkapan yang digunakan sebagai berikut:”

1) “*Adequate disclosure* (pengungkapan cukup)”

“Konsep ini digunakan untuk pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor”.

2) “*Fair disclosure* (pengungkapan wajar)”

“Konsep ini digunakan untuk tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial”.

3) “*Full disclosure* (pengungkapan penuh)”

“Konsep ini digunakan apabila memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik. Bagi beberapa pihak pengungkapan penuh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan”.

Menurut Hidayat (2017), “terdapat 2 jenis pengungkapan laporan keuangan, yaitu:”

1) “Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yaitu pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagaimana telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)”.

2) “Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan melebihi pengungkapan yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, “laporan tahunan wajib paling sedikit memuat:”

- a) “Ikhtisar data keuangan penting”;
- b) “Informasi saham (jika ada)”;
- c) “Laporan direksi”;
- d) “Laporan dewan komisaris”;
- e) “Profil emiten atau perusahaan publik”;
- f) “Analisis dan pembahasan manajemen”;
- g) “Tata kelola emiten atau perusahaan publik”;
- h) “Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik”;
- i) “Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit”; dan
- j) “Surat pernyataan tanggung jawab anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan”.

“Variabel *disclosure* diukur dengan indeks yang diatur dalam Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) Nomor: KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik” (Fitriani dan Dharma, 2007 dalam Saputra dan Kustina, 2018). Menurut Saputra dan Kustina (2018), “penentuan indeks *disclosure* dilakukan dengan menggunakan skor *disclosure* yang diungkapkan oleh perusahaan”. Indeks *disclosure* dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Indeks *Disclosure*

No	Keterangan
1	Ikhtisar data keuangan penting.
2	Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan.
3	Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan.
4	Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi.

No	Keterangan
5	Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan.
6	Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha.
7	Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan perusahaan.
8	Nama dan alamat perusahaan.
9	Riwayat singkat perusahaan.
10	Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.
11	Struktur organisasi dalam bentuk bagan.
12	Visi dan misi perusahaan.
13	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris.
14	Nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota direksi.
15	Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan).
16	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya.
17	Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut.
18	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham perusahaan dicatatkan.
19	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal.
20	Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional.
21	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan.
22	Tinjauan operasi per segmen usaha.

No	Keterangan
23	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
24	Prospek usaha dari perusahaan.
25	Aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar.
26	Kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen.
27	Tata kelola perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).
28	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.
29	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
30	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
31	Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.
32	Ringkasan statistik keuangan untuk 3-5 tahun.
33	Informasi tentang penelitian dan pengembangan.

Sumber: Fitriani dan Dharma (2007) dalam Saputra dan Kustina (2018)

Berdasarkan Nurul (2012) dalam Saputra dan Kustina (2018), “jika perusahaan mengungkapkan item informasi dalam laporan keuangan, maka skor 1 akan diberikan dan jika item tersebut tidak diungkapkan, maka 0 akan diberikan”. Menurut Saputra dan Kustina (2018), “*disclosure level* dapat ditentukan dengan rumus:”

$$Disclosure\ Level = \frac{Jumlah\ skor\ disclosure\ yang\ terpenuhi}{Jumlah\ skor\ maksimum} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Disclosure Level = Tingkat pengungkapan perusahaan

Jumlah skor maksimum = 33

“*Disclosure* akan mempermudah para pengguna dalam melihat kondisi keuangan secara rinci. Informasi yang diperoleh para investor atau pengguna laporan keuangan akan semakin banyak bila tingkat *disclosure* perusahaan

semakin tinggi. Jika informasi yang didapat pengguna laporan keuangan semakin banyak, maka investor akan lebih mudah mengambil keputusan investasi secara cermat dan cepat. Para investor sangat mengharapkan agar perusahaan bersedia untuk mengungkapkan segala informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan dapat lebih transparan untuk mempermudah para investor” (Sari, 2012 dalam Kusumayanti dan Widhiyani, 2017). “Perusahaan yang melakukan pengungkapan sesuai dengan standar pengungkapan cenderung menerima *clear opinion*. Perusahaan yang mengungkapkan lebih sedikit informasi akuntansi cenderung mendapatkan *qualified opinion* dari auditor” (Lestari dan Prayogi, 2017). “Semakin banyak informasi yang diungkapkan, maka kecenderungan entitas untuk menerima opini wajar tanpa pengecualian semakin tinggi” (Kusumayanti dan Widhiyani, 2017).

“Selain berguna untuk para investor, pengungkapan informasi akan memudahkan auditor dalam menilai kondisi keuangan perusahaan dan dijadikan salah satu dasar pertimbangan auditor untuk mempermudah pemberian opini” (Astari dan Latrini, 2017). “Informasi akan menjadi semakin mudah didapat dari perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dengan tingginya tingkat *disclosure*. Auditor akan lebih mudah menemukan bukti-bukti yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan dan mengeluarkan opininya” (Junaidi dan Hartono, 2010 dalam Kusumayanti dan Widhiyani, 2017). “Semakin tinggi *disclosure level* yang dilakukan perusahaan, maka semakin banyak pula informasi yang ada. Semakin luas informasi keuangan yang diungkap oleh perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang buruk, maka auditor akan lebih mudah menemukan bukti dalam menilai kelangsungan usaha perusahaan” (Saputra dan Kustina, 2018).

“Semakin lengkap *item* yang diungkap dalam suatu laporan keuangan dan tahunan, semakin lengkap pula informasi yang diperoleh. Pengungkapan informasi yang semakin lengkap, akan memudahkan auditor dalam mendapatkan informasi yang digunakan dalam menilai risiko perusahaan terutama pada perusahaan dengan kinerja yang kurang baik. Semakin mudah auditor untuk menilai risiko perusahaan, maka auditor juga akan lebih mudah

untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan sehingga memperbesar pemberian opini audit *going concern*” (Septiana dan Diana, 2019).

Hasil penelitian Kusumayanti dan Widhiyani (2017), Saputra dan Kustina (2018), dan Miraningtyas dan Yudowati (2019) menemukan bahwa “*disclosure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*”. Berbeda dengan penelitian Lestari dan Prayogi (2017), Septiana dan Diana (2019), serta Ramadhani dan Sulistyowati (2020) menemukan bahwa “*disclosure* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*”. Berdasarkan penjelasan mengenai *disclosure* yang diukur dengan *disclosure index* dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*, maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

Ha₄ : Disclosure yang diprosikan dengan Disclosure Index berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern

2.1.10 Financial Distress

Dewi dan Latrini (2018) mendefinisikan *financial distress* sebagai “kondisi yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan yaitu ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan secara terus-menerus yang dikhawatirkan akan berujung pada kebangkrutan perusahaan”. Menurut Ramadhany (2014) dalam Sadirin *et al.* (2017), “kondisi keuangan perusahaan menggambarkan bagaimana kondisi kesehatan perusahaan sesungguhnya”. “Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan” (Sadirin *et al.*, 2017).

Seventeen (2019) menjelaskan “beberapa sebab kebangkrutan perusahaan, yaitu:”

- 1) “Sektor ekonomi”
“Penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi antara lain:
 - a) Gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa.
 - b) Adanya kebijakan keuangan.
 - c) Surplus/defisit dalam hubungannya dengan neraca perdagangan luar negeri.

- d) Suku bunga, devaluasi, dan atau revaluasi uang dalam hubungannya dengan mata uang asing serta neraca pembayaran”.
- 2) “Sektor sosial”
“Penyebab kebangkrutan dari sektor sosial antara lain:
- a) Perubahan gaya hidup masyarakat yang memengaruhi permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa.
 - b) Cara perusahaan berhubungan dengan karyawannya.
 - c) Terjadinya kerusuhan dalam masyarakat bersangkutan”.
- 3) “Sektor pemerintah”
“Penyebab kebangkrutan dari sektor pemerintah antara lain:
- a) Kebijakan pencabutan subsidi pada suatu perusahaan.
 - b) Perubahan pada kebijakan tarif dan kuota terhadap barang-barang ekspor dan impor.
 - c) Adanya peraturan/undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja”.
- 4) “Sektor teknologi”
“Penggunaan teknologi informasi juga merupakan akar dari kebangkrutan karena biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan untuk implementasi teknologi informasi tersebut akan membesar untuk pemeliharaan dan pengembangan serta penggunaan teknologi informasi membutuhkan rencana matang dari pihak manajemen”.

Menurut Laksmiati dan Atiningsih (2018), “*financial distress* timbul karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan sendiri (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal). Menurut Seventeen (2019), “penyebab eksternal terjadinya kebangkrutan sebagai berikut:”

- 1) “Sektor konsumen”
- a) “Ketidakmampuan mengidentifikasi sifat dan keinginan konsumen.
 - b) Ketidakmampuan menciptakan peluang guna menemukan konsumen baru.
 - c) Ketidakmampuan memelihara siklus hidup suatu produk atau jasa”.

2) “Sektor distributor”

“Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung pada seberapa jauh pemasok ini terhubung dengan perdagangan bebas”.

3) “Sektor pesaing”

“Pesaing harus selalu menjadi perhatian utama dari suatu perusahaan karena apabila produk pesaing lebih dapat diterima masyarakat maka kita akan kehilangan konsumen, kehilangan laba, kekurangan modal yang mengarah pada kesulitan keuangan”.

Menurut Seventeen (2019), “penyebab internal terjadinya kebangkrutan perusahaan antara lain:”

- a) “Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan.
- b) Manajemen yang tidak efisien dan efektif.
- c) Hasil penjualan yang tidak memadai (menurun).
- d) Kesalahan dalam menetapkan harga jual produk atau jasa.
- e) Tingkat investasi dalam aset tetap dan persediaan yang melampaui batas.
- f) Berkurangnya laba yang membuat perusahaan kekurangan modal kerja.
- g) Sistem dan prosedur akuntansi kurang efektif dan efisien.
- h) Penyalahgunaan wewenang serta kecurangan-kecurangan individu maupun kelompok dalam suatu perusahaan”.

Menurut Hani (2015) dalam Rialdy (2017), “terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa perusahaan berada pada kondisi yang mengarah pada kebangkrutan, yaitu:”

1) “Terjadinya penurunan aset

Ditandai dengan semakin rendah nilai total aset pada neraca, jika dilihat dari rasio aktivitas maka nilai perputaran aset semakin rendah, demikian pula dengan perputaran piutang, dan perputaran persediaan yang semakin rendah pula”.

2) “Penurunan penjualan

Penjualan yang menurun menunjukkan tidak adanya pertumbuhan usaha, semakin rendah produktivitas, dan menandakan bahwa terdapat permasalahan dalam penetapan strategi penjualan”.

3) “Perolehan laba dan profitabilitas yang semakin rendah.

Dua hal yang dapat memicu penurunan laba yaitu pendapatan dan beban. Disebabkan oleh biaya yang meningkat walaupun terjadi peningkatan pendapatan. Apabila peningkatan beban tinggi maka tidak mungkin akan terjadi peningkatan laba”.

4) “Berkurangnya modal kerja

Modal kerja merupakan bagian penting dari kegiatan operasional perusahaan dan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola pembiayaan perusahaan, dengan pendanaan yang dimiliki maka diharapkan produktivitas perusahaan berjalan dengan lancar”.

5) “Tingkat utang yang semakin tinggi

Tingkat utang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari para kreditor, namun tingkat utang yang semakin tinggi juga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan”.

Menurut IAI (2019) dalam KKPK, “aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas”. “Total aset dalam laporan posisi keuangan merupakan jumlah keseluruhan aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan perusahaan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi” (Kieso *et al.*, 2018). Menurut Kieso *et al.* (2018), “lima *item* dalam aset lancar adalah persediaan (*inventories*), beban dibayar di muka (*prepaid expenses*), piutang (*receivables*), investasi jangka pendek (*short term investment*), serta kas dan setara kas (*cash and cash equivalent*)”. “Aset tidak lancar (*non-current assets*) adalah jenis aset yang tidak termasuk dalam definisi aset lancar. Aset tidak lancar terdiri dari investasi jangka panjang (*long-term*

investments), properti, pabrik, dan peralatan (*property, plant, and equipment*), aset tak berwujud (*intangible assets*), dan aset lainnya (*other assets*) (Kieso *et al.*, 2018).

“Kondisi keuangan menjadi perhatian bagi banyak pihak, tidak hanya manajemen perusahaan saja, karena kelangsungan usaha dan kondisi keuangan menentukan kemakmuran berbagai pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*), seperti di antaranya adalah para investor, kreditor, dan pihak lainnya” (Yusriwati dan Mariyani, 2019). Menurut Dewi *et al.* (2019), “model *financial distress* perlu dikembangkan sejak dini karena dengan mengetahui kondisi *financial distress*, perusahaan diharapkan dapat melakukan tindakan yang mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan”.

“Kondisi *financial distress* pada sebuah perusahaan dapat diprediksi menggunakan model prediksi kebangkrutan Altman *Z-score*” (Damanhuri dan Putra, 2020). “Analisis *Z-score* adalah alat prediksi kebangkrutan yang dibuat oleh Dr. Edward I. Altman di tahun 1968. Metode ini menggunakan rasio-rasio tertentu dalam rangka memprediksi risiko kebangkrutan perusahaan” (Nugroho dan Mawardi, 2012 dalam Yati dan Patunrui, 2017). “*Z-score* merupakan suatu formula yang dikembangkan Altman untuk mendeteksi kebangkrutan perusahaan pada beberapa periode sebelum terjadinya kebangkrutan” (Saputra dan Kustina, 2018).

Menurut Seventeen (2019), “terdapat 3 model Altman *Z-score* yaitu model Altman *Z-score* pertama, model Altman *Z-score* revisi, dan model Altman *Z-score* modifikasi”. Hani (2015) dalam Rialdy (2017) menyatakan “model Altman *Z-score* pertama merupakan persamaan model kebangkrutan yang ditujukan bagi perusahaan manufaktur. Model Altman *Z-score* revisi merupakan model yang dikembangkan dari model Altman *Z-score* pertama”. “Revisi yang dilakukan Altman pada model pertama dilakukan agar model prediksi kebangkrutan tidak hanya berlaku bagi perusahaan manufaktur *go public* melainkan dapat diaplikasikan pada perusahaan-perusahaan sektor swasta” (Lukviarman dan Ramadhani, 2009 dalam Seventeen, 2019). “Model Altman *Z-score* modifikasi dibuat oleh Altman dalam menyempurnakan rumus

Altman *Z-score* agar dapat digunakan perusahaan manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi baik perusahaan *private* maupun *go public*" (Seventeen, 2019).

"Model Altman *Z-score* yang digunakan pada penelitian ini adalah model Altman yang pertama" (Rusman, 2021). "Model Altman pertama memberikan kualitas prediksi kebangkrutan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan model Altman revisi maupun modifikasi" (Ramadhani dan Lukviarman, 2009 dalam Rusman (2021)). "Model Altman *Z-score* pertama menurut Seventeen (2019) sebagai berikut:

$$Z = 1,2 X_1 + 1,4 X_2 + 3,3 X_3 + 0,6 X_4 + 0,999 X_5 \quad (2.5)$$

Dewi dan Latrini (2018) menyatakan "nilai *Z* didapatkan dengan menghitung kelima rasio dari data laporan keuangan dengan koefisien masing-masing rasio, kemudian dijumlahkan hasilnya". Menurut Seventeen (2019), "terdapat lima rasio keuangan yang digunakan, yaitu:"

- 1) *Working capital to total assets* (X_1)

$$X_1 = \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Assets}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

Working Capital = Modal kerja bersih (*current assets* – *current liabilities*)

Total Assets = Total aset

"*Working capital* (modal kerja) didapat dari aset lancar dikurangi kewajiban lancar". Selain *current assets*, terdapat *current liabilities* yang menjadi komponen dalam *working capital*. *Current liabilities* sebagai kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam tahun mendatang atau dalam siklus operasionalnya". "*Current liabilities* terdiri dari *accounts payable, notes payable, current maturities of long-term debts, short term obligations expected to be refinanced, customer advance and deposits, unearned revenues, sales and value-added taxes payable, income taxes payable, dan employee related liabilities*" (Weygandt *et al.*, 2019).

Berdasarkan Munawir (2016) dalam Paleni *et al.* (2018), “tiga konsep modal kerja yang dipergunakan, yaitu:”

- a) “Konsep kuantitatif menitikberatkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin, menunjukkan dana (*fund*) yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Konsep ini menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aset lancar (*gross working capital*)”.
- b) “Konsep kualitatif menitikberatkan pada kualitas modal kerja merupakan kelebihan aset lancar terhadap liabilitas lancar (*net working capital*)”.
- c) “Konsep fungsional menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan (laba) dari usaha pokok perusahaan. Pada dasarnya, dana-dana yang dimiliki perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan”.

“Penggunaan modal kerja biasa dilakukan untuk pengeluaran gaji, upah, biaya operasi perusahaan lainnya, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga, pembentukan dana, pembelian aset tetap (tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain), pembayaran utang jangka panjang (obligasi, hipotek, utang bank jangka panjang), pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar, dan pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi, dan penggunaan lainnya” (Kasmir, 2008 dalam Lestari dan Farida, 2017).

“*Working capital to total assets* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aset yang dimiliki. Rasio dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aset. Modal kerja bersih diperoleh dari aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar” (Sari *et al.*, 2020). “Modal kerja bersih negatif kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aset lancar yang

cukup untuk menutupi kewajiban tersebut. Semakin kecil rasio ini dapat memberikan indikasi bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan” (Yati dan Patunrui, 2017).

2) *Retained earnings to total assets* (X_2)

$$X_2 = \frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total Assets}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

Retained Earnings = Saldo laba

Total Assets = Total aset

“*Retained earnings* merupakan laba perusahaan yang tidak didistribusikan” (Kieso *et al.*, 2018). “*Retained earnings* merupakan salah satu akun yang termasuk dalam kategori *equity*, sehingga saldo normal saldo laba berada di sisi kredit. Ketika perusahaan memiliki laba bersih, maka laba bersih akan ditutup pada akun *retained earnings* dengan menjurnal *income summary* pada sisi debit dan akun *retained earnings* pada sisi kredit. Ketika perusahaan mengalami rugi bersih maka akan ditutup dalam akun *retained earnings* dengan menjurnal akun *retained earnings* pada sisi debit dan akun *income summary* pada sisi kredit. Saldo *retained earnings* umumnya tersedia untuk pengumuman dividen. Dalam beberapa kasus, akun *retained earnings restrictions*, di mana akun tersebut berisi sebagian saldo yang tidak tersedia untuk dividen, biasanya perusahaan akan mengungkapkan akun tersebut dalam catatan atas laporan keuangan” (Weygandt *et al.*, 2019).

Menurut Endri (2009) dalam Riantani *et al.* (2020), “*retained earnings to total assets* digunakan untuk menilai besarnya kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan membandingkannya dengan total aset sebagai efisiensi usaha”. “Ketika X_2 semakin kecil/bernilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menghasilkan saldo laba dari seluruh aset yang perusahaan dan tidak ada laba yang dibagikan berupa dividen maupun keperluan pembayaran kewajiban” (Harlen *et al.*, 2019).

Endri (2009) dalam Riantani *et al.* (2020) menyatakan “perusahaan yang

menghasilkan laba sedikit dalam aktivitas operasinya maka akan memiliki saldo laba yang kecil sehingga nilai rasio menjadi kecil. Terlebih untuk perusahaan yang mengalami kerugian, nilai rasio akan menjadi negatif”. “*Retained earnings* yang negatif menunjukkan bahwa sumber internal perusahaan tidak mencukupi sehingga perusahaan membutuhkan dana eksternal yaitu dengan berutang. Apabila utang perusahaan tinggi, maka kewajiban untuk membayar utang dan beban bunga semakin besar” (Savitri dan Rahmawati, 2017). Fahmi (2014) dalam Sopian dan Rahayu (2017) menyatakan “semakin besar utang yang dimiliki, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan tidak mampu melunasi utang-utangnya ketika jatuh tempo sehingga dapat menjadi indikasi perusahaan akan mengalami *financial distress*”.

3) *Earnings before Interest and taxes to total assets* (X_3)

$$X_3 = \frac{\text{Earnings Before Interest and Taxes}}{\text{Total Assets}} \quad (2.8)$$

Keterangan:

EBIT = Pendapatan sebelum bunga dan pajak

Total Assets = Total aset

“*Earnings before interest and taxes* adalah jumlah laba operasional yang direalisasikan sebelum menghitung bunga dan pajak” (Novia dan Salim, 2019). Subramanyam (2014) menjelaskan bahwa “laba sebelum bunga dan pajak menyerupai pendapatan operasional sebelum pajak”. “*Income from operations* merupakan penghasilan perusahaan yang didapatkan dari operasi normal” (Kieso *et al.*, 2018). Berdasarkan Subramanyam (2014), “pendapatan operasional (*operating income*) merupakan perhitungan terhadap pendapatan perusahaan dari aktivitas operasional berjalan. Tiga aspek penting dari *operating income*, yaitu:”

- a) “*Operating income* hanya berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas operasional. Oleh karena itu, setiap pendapatan (dan pengeluaran) yang tidak terkait dengan operasional bisnis bukan merupakan bagian dari *operating income*”.

- b) “*Operating income* berfokus pada pendapatan perusahaan secara keseluruhan untuk pemegang utang dan ekuitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dan beban dari pembiayaan (*financing*), terutama beban bunga dikecualikan saat mengukur *operating income*.”
- c) “*Operating income* hanya berkaitan dengan aktivitas bisnis yang sedang berlangsung, yang berarti setiap pendapatan dan kerugian yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan (*discontinued operations*) dikecualikan dari *operating income*”.

Berdasarkan Kieso *et al.* (2018), “penyajian *EBIT* dalam sebuah *income statement* sebagai berikut:”

Sales		xxx
Cost of Goods Sold		(xxx)
Gross Profit		xxx
Selling Expenses	(xxx)	
General or Administrative Expenses	(xxx)	
		(xxx)
Other Income		xxx
Other Expenses	(xxx)	
		xxx
Income from operations (EBIT)		xxx

Gambar 2. 1 Penyajian *EBIT* dalam *Income Statement*

“*Earnings before interest and taxes to total assets* menunjukkan ukuran produktivitas perusahaan yakni kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum pembayaran bunga dan pajak dilihat dari aset perusahaan yang sesungguhnya” (Yati dan Patunrui, 2017). Menurut Harlen *et al.* (2019), “ X_3 yang bernilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimiliki sebelum pengurangan pajak dan bunga”. “Kemampuan menghasilkan laba yang rendah menunjukkan bahwa pengelolaan aset perusahaan belum produktif. Kondisi ini akan mempersulit perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan untuk investasi, sehingga memperbesar kemungkinan mengalami *financial distress*” (Dewi dan Wahyuliana, 2019 dalam Giovanni *et al.*, 2020).

4) *Market value of equity to book value of debt* (X_4)

$$X_4 = \frac{\text{Market Value of Equity}}{\text{Book Value of Debt}} \quad (2.9)$$

Keterangan:

Market Value of Equity = Nilai pasar ekuitas perusahaan

Book Value of Debt = Nilai buku utang

Berdasarkan IAI (2019) dalam KKPK, “ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas”. “Ekuitas diidentifikasi dengan nama *stockholders’ equity*, *shareholders equity*, atau *corporate capital*. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan jajaran direksi di setiap pertemuan tahunan dan memilih setiap tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, menerima pendapatan perusahaan berupa dividen, mempertahankan persentase kepemilikan yang sama saat saham baru diterbitkan (*preemptive rights*), menerima pembagian aset ketika perusahaan melakukan likuidasi sesuai dengan proporsi kepemilikannya yang disebut sebagai *residual claim*” (Weygandt *et al.*, 2019). Berdasarkan Kieso *et al.* (2018), “ekuitas terbagi menjadi *share capital*, *share premium*, *retained earnings*, *accumulated other comprehensive income*, *treasury shares*, dan *non-controlling interest (minority interest)*”.

“Nilai pasar ekuitas perusahaan diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham biasa yang beredar dengan harga pasar per lembar saham biasa” (Yati dan Patunrui, 2017). “Nilai pasar ekuitas adalah nilai modal yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan penilaian yang diberikan oleh para pelaku pasar. Nilai pasar ekuitas menjadi salah satu alat ukur untuk menghitung nilai kini semua arus kas masa depan yang akan diperoleh pemegang saham dalam menggambarkan ukuran perusahaan” (Sunaryo dan Saripujiana, 2018). “Perusahaan dengan nilai pasar ekuitas yang rendah biasanya dimiliki oleh perusahaan berskala kecil yang dinilai mempunyai risiko lebih tinggi daripada perusahaan berskala besar” (Erbach, 2020). Samsuar dan Akramunnas (2017) menyatakan

“harga saham merupakan harga pasar yang tercatat pada waktu penutupan (*closing price*)”.

Menurut IAI (2019) dalam KKPK, “liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik”. “Nilai buku utang diperoleh dengan menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban tidak lancar” (Yati dan Patunrui, 2017). “Kewajiban lancar (*current liabilities*) yaitu kewajiban yang diharapkan untuk dibayar oleh perusahaan dalam siklus normal operasi perusahaan/dua belas bulan setelah tanggal laporan keuangan. Terdapat beberapa kategori dari *current liabilities*, yaitu *account payable*, *notes payable*, *current maturities of long-term debt*, *short term obligations expected to be refinanced*, *dividend payable*, *customer advance and deposits*, *unearned revenues*, *sales and value-added taxes payable*, *income taxes payable*, dan *employee related liabilities*” (Kieso *et al.*, 2018). “Kewajiban jangka panjang (*non-current liabilities*) yaitu kewajiban yang diharapkan untuk dibayar oleh perusahaan setelah satu tahun. *Non-current liabilities* diklasifikasikan menjadi *bonds payable*, *mortgages payable*, *long-term notes payable*, *lease liabilities*, dan *pension liabilities*” (Weygandt *et al.*, 2019).

Santoso dan Simamora (2019) menyatakan “*market value of equity to book value of debt* menunjukkan perbandingan antara nilai pasar ekuitas dengan nilai buku utang”. “ X_4 yang rendah disebabkan oleh harga saham yang menurun sehingga investor tidak tertarik untuk membeli saham. Selain itu, dengan rasio yang rendah tersebut menunjukkan perusahaan memiliki utang yang tinggi” (Ramadhan dan Nasution, 2020). “Utang yang tinggi menyebabkan risiko gagal bayar dari pokok utang dan beban bunga semakin tinggi” (Sondakh *et al.*, 2019). Giovanni *et al.* (2020) menyatakan “ketika perusahaan berkemungkinan besar mengalami gagal bayar, maka semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami masalah

keuangan”. “Hal ini dapat menimbulkan terjadinya *financial distress*” (Endri, 2009 dalam Riantani *et al.*, 2020)”.

5) *Sales to total assets* (X_5)

$$X_5 = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Asset}} \quad (2.10)$$

Keterangan:

Sales = Penjualan

Total Assets = Total aset

“Pendapatan adalah arus masuk peningkatan aset lainnya dari suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya (atau kombinasi keduanya) selama periode pengiriman atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau pusat entitas yang sedang berjalan. Aktivitas lain tersebut meliputi bunga, dividen, royalti, dan sewa” (Kieso *et al.*, 2018).

“*Sales to total assets* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari semua aset yang dimiliki” (Puspitasari *et al.*, 2017). “Rasio perputaran aset menggambarkan bahwa jika perputaran lambat, maka menunjukkan bahwa aset yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk menjual” (Prasetyo, 2014 dalam Riantani *et al.*, 2020). “Jika penjualan menurun, maka laba pun ikut menurun bahkan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan perusahaan mengalami *financial distress*” (Endri, 2009 dalam Riantani *et al.*, 2020).

Berdasarkan Saputra dan Kustina (2018), “kriteria yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan model diskriminan adalah dengan melihat *zone of ignorance* yaitu daerah nilai *Z*”. Muslich (2000) dalam Yati dan Patunrui (2017) menyatakan “dalam model tersebut perusahaan yang mempunyai skor *Z-score* > 2,99 diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat, sedangkan yang mempunyai skor *Z-score* < 1,81 dikategorikan perusahaan potensial bangkrut, serta skor $1,81 < Z\text{-score} < 2,99$ diklasifikasikan sebagai perusahaan pada daerah kelabu (*grey area*)”. Menurut Arita *et al.* (2017),

“semakin tinggi nilai *financial distress*, maka perusahaan dikategorikan dalam *safe zone*, yaitu area di mana perusahaan dikatakan aman dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan dengan nilai *cut-off Z-score* tertentu”. Menurut Noviadani *et al.* (2018), “perusahaan dengan *Z-score* tinggi berarti memiliki kinerja keuangan yang baik dan tercermin dalam peningkatan kemampuan likuiditas perusahaan, peningkatan dalam menghasilkan laba bersih maupun laba sebelum pajak, serta kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari modal yang dimiliki perusahaan sendiri”.

Nanda (2015) dalam Shulhiyyah (2019) menjelaskan “manajemen dalam mengembangkan tugasnya sering dihadapkan pada kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan mengalami kegagalan, dalam kondisi yang tidak sehat, dan mengalami krisis yang berkelanjutan sehingga mengarahkan perusahaan pada kebangkrutan. Hal ini tercermin pada kondisi keuangan perusahaan”. “Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan, semakin baik bagi manajemen karena dapat melakukan perbaikan sejak awal. Pihak kreditor dan pemegang saham juga bisa melakukan persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk” (Wawo dan Nirwana, 2020).

“Semakin rendah nilai *financial distress* berarti perusahaan dikategorikan dalam kategori *distress zone* yang merupakan area di mana perusahaan memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami kebangkrutan dengan *cut-off Z-score* tertentu” (Arita *et al.*, 2017). Septiana dan Diana (2019) menyatakan “semakin kecil nilai *Z-score* menunjukkan bahwa perusahaan sedang berada dalam kondisi kesulitan keuangan dan berisiko tinggi pada kebangkrutan sehingga kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* semakin besar”. Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai *Z-score*, maka semakin besar kemungkinan auditor mengeluarkan opini audit *going concern*.

Hasil penelitian Dewi dan Latrini (2018) menemukan bahwa “*financial distress* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*”. Hasil penelitian Damanhuri dan Putra (2020) menemukan bahwa “*financial distress* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*”. Berbeda

dengan penelitian Ginting dan Tarihoran (2017), Sadirin *et al.* (2017), dan Septiana dan Diana (2019) menemukan bahwa “*financial distress* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*”. Berdasarkan penjelasan mengenai *financial distress* yang diproksikan dengan metode prediksi Altman *Z-score* pertama dan pengaruhnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*, maka dapat diajukan hipotesis alternatif sebagai berikut:

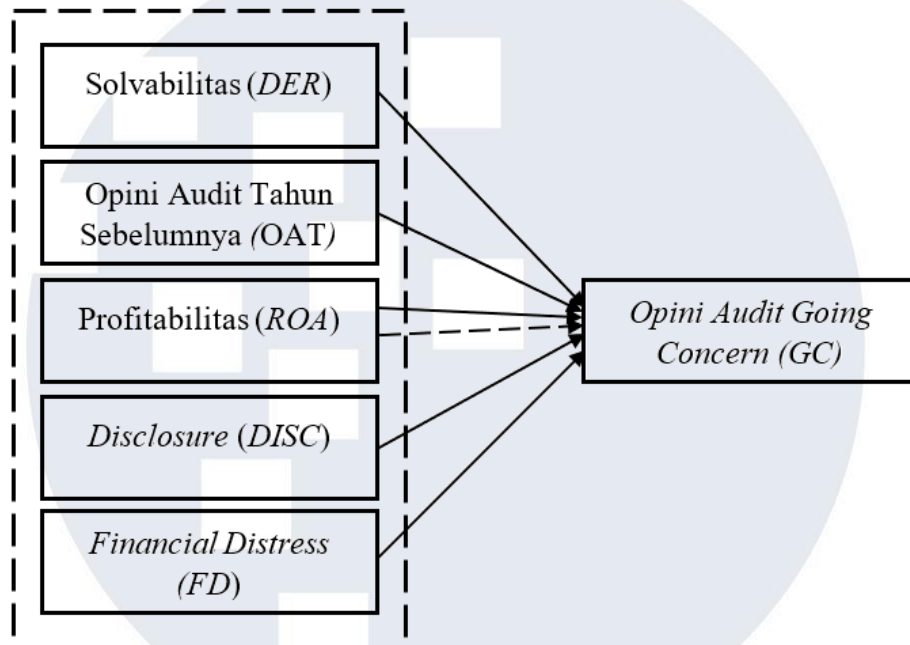
Ha₅ : Financial distress berpengaruh negatif terhadap opini audit going concern.

Hasil penelitian Irwanto dan Tanusdjaja (2020) menunjukkan bahwa “variabel independen, yaitu solvabilitas (*DTA*), profitabilitas (*ROA*), dan likuiditas (*CR*) secara simultan memiliki pengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern*”. Hasil penelitian Sadirin *et al.* (2017) menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu “*financial distress*, perkara pengadilan, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*”. Hasil penelitian Syahputra dan Yahya (2017) menunjukkan “*audit tenure*, *audit delay*, opini audit tahun sebelumnya, dan *opinion shopping* secara simultan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*”. Hasil penelitian Haryanto dan Sudarno (2019) menunjukkan bahwa “solvabilitas (*DER*), profitabilitas (*ROE*), likuiditas (*CR*), dan rasio pasar (*EPS*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*”. Hasil penelitian Suryo *et al.* (2019) juga menunjukkan bahwa “*audit tenure*, *debt default*, dan opini audit tahun sebelumnya secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*”.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Model Penelitian